

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENGADILAN PADA PUTUSAN
ARBITRASE BERDASARKAN PASAL 72 AYAT 4 UNDANG-UNDANG NO. 30
TAHUN 1999 (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Tinggi JAKARTA
Nomor 202/PDT/2015/PT.DKI Tahun 2015)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

BREGAS EKA ADHINATA YUSWANTO
NIM. 105010100111038



**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENGADILAN
PADA PUTUSAN ARBITRASE BERDASARKAN
PASAL 72 AYAT 4 UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN
1999 (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Tinggi
JAKARTA Nomor 202/PDT/2015/PT.DKI Tahun 2015)**

Identitas Penulis :

a. Nama : **Bregas Eka Adhinata Yuswanto**
b. NIM : **105010100111038**

Konsentrasi : **Hukum Perdata Bisnis**

Jangka Waktu Penelitian : **5 Bulan**

Disetujui pada tanggal : 25 Mei 2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Budi Santoso S.H., LL.M.

NIP. 197206222005011002

Shanti Riskawati S.H., M.Kn.

NIP. 2012018012162001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Dr. Budi Santoso S.H., LL.M.

NIP. 197206222005011002

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENGADILAN PADA PUTUSAN
ARBITRASE BERDASARKAN PASAL 72 AYAT 4 UNDANG-UNDANG NO. 30
TAHUN 1999 (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Tinggi JAKARTA Nomor
202/PDT/2015/PT.DKI Tahun 2015)**

**Oleh:
Bregas Eka Adhinata Yuswanto
105010100111038**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Budi Santoso S.H., LL.M

NIP. 197206222005011002

Shanti Riskawati S.H., M.Kn

NIP. 2012018012162001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian

Hukum Perdata,

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si

NIP. 196208051988021001

Dr. Budi Santoso S.H., LL.M

NIP. 197206222005011002



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia, sehingga bisa sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini, penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadap:

1. Kedua orang tua saya yang tiada habisnya mendoakan, memberikan semangat dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Bapak Dr. Budi Santoso S.H., LL.M, selaku Dosen Pembimbing I dan Ketua Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Shanti Riskawati S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Arif Zainudin, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum yang telah memberikan bantuan dan wejangan dalam proses penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen dan Staff pengajar Jurusan Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, baik yang pernah mengajar dan memberikan ilmunya maupun tidak;
7. Teman-teman terdekat di Fakultas Hukum, Windy, Reta, Eliz, Yudi yang telah memberikan keceriaan, motivasi dan persahabatan;

8. Saudari satu-satunya drg. Dyah Hapsari yang memberikan doa dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Serta pihak-pihak lain yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis mensyukuri bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif senantiasa penulis harapkan sebagai masukan positif.

Akhir kata penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga segala kontribusi tersebut dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 23 Mei 2018

Penulis

Bregas Eka Adhinata Yuswanto

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang Masalah.....	2
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1. Pengertian Arbitrase.....	15
2.2. Jenis Arbitrase	17
2.3. Kekurangan Arbitrase	20
2.4. Kelebihan Arbitrase.....	22
2.5. Dasar Hukum Arbitrase.....	24
2.6. Perjanjian Arbitrase.....	25
2.7. Kewenangan Arbitrase	31
2.8. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase.....	35

BAB III	METODE PENELITIAN	45
3.1	Jenis Penelitian.....	45
3.2	Metode Pendekatan	45
3.3	Jenis dan Sumber Bahan Hukum	46
3.4	Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	47
3.5	Teknik Analisis Bahan Hukum	47
3.6	Definisi Konseptual.....	48
BAB IV	PEMBAHASAN.....	50
4.1	Gambaran Umum tentang Arbitrase.....	50
4.2	Pembatalan Putusan Arbitrase	54
4.3	Analisis Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999	64
4.4	Analisis Putusan No. 202/PDT/2015/PT.DKI.....	74
BAB V	PENUTUP.....	79
5.1	Kesimpulan.....	79
5.2	Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA		81
LAMPIRAN		

RINGKASAN

Bregas Eka Adhinata Yuswanto, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2018, **Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengadilan Pada Putusan Arbitrase Berdasarkan Pasal 72 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Tinggi JAKARTA Nomor 202/PDT/2015/PT.DKI Tahun 2015).**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi kewenangan pengadilan dalam pemberian putusan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase yang sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*case approach*) dan studi kasus (*case study*). Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum diawali dengan kegiatan inventarisasi, dengan pengkoleksian dan perorganisasian bahan-bahan hukum kedalam suatu informasi.

Teknik analisis bahan hukum menggunakan cara interpretasi secara sistematis yang menghubungkan peraturan perundang-undangan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau keseluruhan sistem hukum, dalam hal ini pasal 72 ayat 4 Undang-undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan Putusan Pengadilan Tinggi JAKARTA Nomor 202/PDT/2015/PT.DKI Tahun 2015.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi JAKARTA Nomor 202/PDT/2015/PT.DKI Tahun 2015 tidak sesuai dengan pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, karena telah terjadi penyalahgunaan wewenang peradilan yakni Pengadilan Tinggi Jakarta yang seharusnya tidak berwenang dalam pembatalan putusan arbitrase. Pembatalan putusan arbitrase hanya dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.

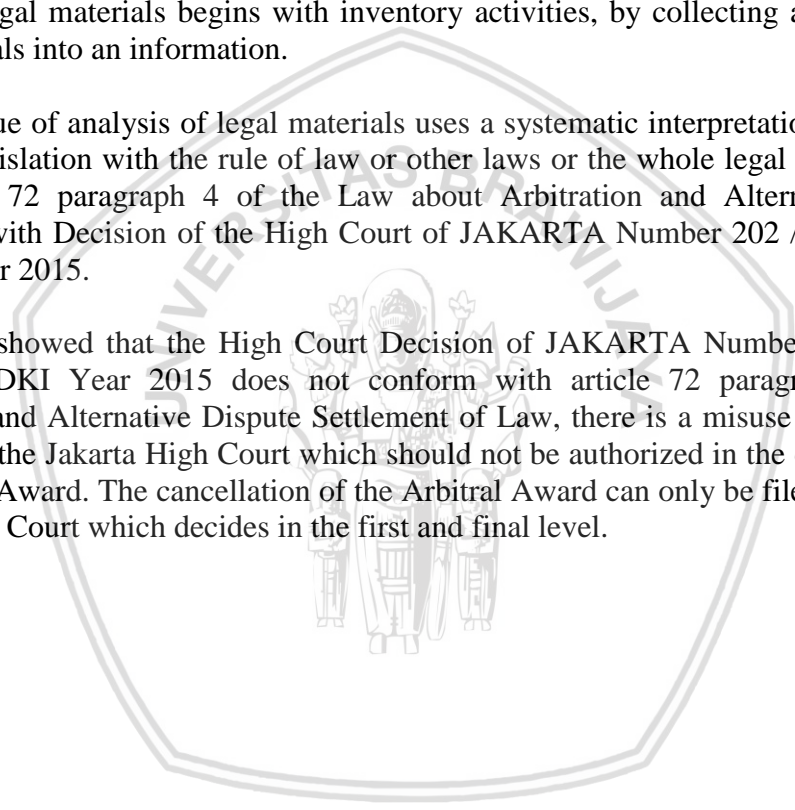
SUMMARY

Bregas Eka Adhinata Yuswanto, Business Law, Faculty of Law University of Brawijaya, May 2018. **Judicial Review of Court's Authority on Arbitration Under Article 72 Paragraph 4 of Law Number 30 Year 1999 (Case Study of High Court Decision Number 202 / PDT / 2015 /PT.DKI Year 2015).**

The purpose of this research is to analyze the function of the court's authority in granting a decision on the request for the cancellation of the Arbitral Award in accordance with the Arbitration and Alternative Dispute Settlement of Law. The type of research used in this research is normative juridical with case approach and case study. Techniques of collecting legal materials begins with inventory activities, by collecting and organizing legal materials into an information.

The technique of analysis of legal materials uses a systematic interpretation method that links the legislation with the rule of law or other laws or the whole legal system, in this case article 72 paragraph 4 of the Law about Arbitration and Alternative Dispute Settlement with Decision of the High Court of JAKARTA Number 202 / PDT / 2015 / PT.DKI Year 2015.

The results showed that the High Court Decision of JAKARTA Number 202 / PDT / 2015 / PT.DKI Year 2015 does not conform with article 72 paragraph 4 of the Arbitration and Alternative Dispute Settlement of Law, there is a misuse of the judicial authority of the Jakarta High Court which should not be authorized in the cancellation of the Arbitral Award. The cancellation of the Arbitral Award can only be filed an appeal to the Supreme Court which decides in the first and final level.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Terjadinya perselisihan atau konflik antar individu tau manusia di dunia ini kerap terjadi, karena tiap individu memiliki kepentingannya masing-masing untuk memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri. Kepentingan yang beraneka ragam tersebut, ada yang sama dan saling memenuhi satu sama lain, ada juga yang bertentangan yang bias mendatangkan konflik atau sengketa antar manusia. Sengketa dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan masing-masing antara para pihak, yaitu bila ada interaksi antara dua atau lebih, dimana salah satu pihak percaya bahwa kepentingannya tidak sama dengan kepentingan yang lain.¹

Konflik-konflik atau sengketa dapat terjadi dalam suatu hubungan perdagangan atau bisnis, karena hal tersebut merupakan resiko yang harus dihadapi oleh para pelaku bisnis. Bahkan konflik tersebut dapat mencakup dalam skala internasional antar bangsa dan negara, serta bersifat lintas hukum.

Dalam hal ini diperlukan hukum perdata materiil yang mengatur adanya hak dan kewajiban agar kepentingan tiap individu dalam pelaksanaan hubungan hukum, dalam hal ini hukum perdata tetap terjaga dan tidak ada gangguan dari pihak lain yang tidak berhubungan. Hukum telah memberikan

¹ Suyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, (Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2004), hal. 12.

sarana untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa. Penyelesaian sengketa dagang sendiri bisa dibedakan secara garis besar dalam dua hal, yakni:

1. Model litigasi, yaitu penyelesaian sengketa dagang yang dilakukan oleh dan melalui lembaga pengadilan (*in court dispute settlement*).
2. Model non litigasi, yaitu penyelesaian sengketa dagang yang dilakukan di luar lembaga pengadilan (*out of court dispute settlement*).

Sengketa dagang yang penyelesaiannya dilakukan secara litigasi seringkali berjalan tidak lancar atau sukar dalam menemukan pemecahannya, tertunda-tunda hingga bertahun-tahun. Karena kurang mampunya proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi yang pada akhirnya malah menimbulkan munculnya masalah baru atau perselisihan karena keputusannya bersifat menang dan kalah, serta tidak dapat menampung kepentingan bersama, maka perlu adanya penyelesaian sengketa yang cepat dan tepat secara efektif.²

Atas dasar hal diatas, penyelesaian konflik yang terjadi kepada para pihak yang berselisih dalam bidang ekonomi lebih sering menggunakan jalur nonlitigasi, yakni mediasi, konsiliasi, atau arbitrase yang menggunakan perantara dalam proses penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan membutuhkan waktu yang cepat, akurat dan final, maka munculah kecenderungan atau *trend* baru di antara para pelaku ekonomi yang lebih memilih penyelesaian perselisihan melalui putusan berua permintaan atau tuntutan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah atau ADR

² Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan International*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal.9.

(*Alternative Disputes Resolution*). Kebiasaan penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan tersebut telah diakomodasi oleh Pemerintah dengan dibentuknya UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Arbitrase memenuhi prinsip efektifitas dan efisiensi yang terdapat dalam ekonomi pasar, maka dari itu perlu dibentuk lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa. Pembentukan lembaga arbitrase merupakan cara untuk menyediakan perangkat hukum dan sarana hokum untuk terpenuhinya kebutuhan yang ada di pasar.

Multidoor courthouse adalah istilah arbitrase yang dikenal di Amerika Serikat dan Kanada, disebut juga dengan *informalcourt* yakni proses pemeriksaan sengketa yang dilakukan tidak di dalam pengadilan.

Pada tahun 1977 tepatnya tanggal 3 Desember dibentuklah suatu badan arbitrase di Republik Indonesia yang kemudian diberi nama Badan Arbitrasi Nasional Indonesia atau BANI dengan merujuk pada SK KADIN tanggal 30 Nopember 1977 No. SKEP/152/DPH/1977. Tugas-tugas dari BANI adalah, menerima permohonan yang diajukan pihak-pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan dalam perjanjian antara kedua pihak yang bersengketa, BANI sendiri adalah badan arbitrase tetap yang ditujukan untuk menangani sengketa perdata yang timbul di bidang keuangan, industri, dan perdagangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Putusan melalui arbitrase bersifat *confidential* tidak dipublikasikan di media masa, rahasia, serta dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak yang terlibat. Dengan begitu pihak-pihak yang terlibat dimungkinkan untuk tetap bisa melakukan hubungan bisnis dan dagang yang sudah terjalin sebelumnya dengan baik. Putusan arbitrase bisa didapat paling lama dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak pengangkatan arbiter, waktu tersebut singkat jika dibandingkan proses peradilan. Jangka waktu tersebut diatur sesuai dengan Pasal 620 Rv dan Pasal 48 UU Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa. Jika terdapat keterlambatan dalam menjatuhkan putusan maka arbiter yang ditunjuk bisa dikenai sanksi denda ganti rugi terhadap pihak-pihak yang bersengketa sesuai dengan pasal 20 UU Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa.

Hanya dalam bidang perdagangan yang bisa dibawa dan diselesaikan melalui arbitrase, kemudian untuk hak-hak yang menurut hukum dan UU sepenuhnya diberikan hak kepada kedua belah pihak yang berselisih. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak (Pasal 60 UU No.30 Tahun 1999). Putusan arbitrase tersebut harus didaftarkan kepada pihak kepaniteraan pengadilan negeri setempat dalam waktu satu bulan (30 hari) sejak putusan diucapkan. Apabila tidak didaftarkan maka putusan arbitrase itu tidak dapat dieksekusi. Para pihak dapat dipaksa untuk mentaati putusan tersebut apabila tidak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu satu bulan setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri

ditulis dalam lembar asli dan salinan autentik dari putusan arbitrase tersebut. Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri dilaksanakan sesuai ketentuan mengenai eksekusi putusan dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³

Dasar hukum dapat dieksekusinya putusan arbitrase adalah adanya title eksekutorial pada putusan tersebut. Pasal 54 (1) UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa putusan arbitrase harus memuat:

- a. Kepala putusan yang berbunyi: *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;
- b. nama lengkap dan alamat para pihak;
- c. uraian singkat sengketa;
- d. pendirian para pihak;
- e. nama lengkap dan alamat arbiter;
- f. mengenai keseluruhan sengketa, bagaimana majelis arbiter dan arbiter memberikan kesimpulan dan pertimbangannya;
- g. ketika terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase, bagaimana tiap-tiap arbiter berpendapat;
- h. inti dari putusan pengadilan setelah amar putusan dibacakan;
- i. tanggal putusan dan dimana putusan tersebut dibacakan; serta
- j. tanda tangan dari majelis arbitrase atau arbiter.

Adanya title eksekutorial yang ada dalam suatu putusan arbitrase terutama arbitrase nasional, maka putusan bisa dilakukan dengan paksa sesuai perintah

³ *Ibid.* Hal. 11.

dari Ketua Pengadilan Negeri. Pelaksanaan putusan arbitrase dilakukan sesuai dengan Pasal 69 ayat 3 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁴

Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa arbitrase memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan yang dimiliki arbitrase, yaitu:⁵

- a. Terjaminnya kerahasiaan konflik kedua belah pihak;
- b. Kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari;
- c. Pihak-pihak yang bersengketa bisa memilih sendiri arbiter yang menurutnya jujur, adil, memiliki kecakapan, pengalaman, pengetahuan, dan latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan;
- d. Pihak-pihak yang bersengketa bisa memilih penyelesaian hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
- e. Putusan arbiter melalui tatacara yang sederhana sehingga dapat langsung dilaksanakan, dan putusannya bersifat *final and binding*.

Akan tetapi, hanya mengenai hak-hak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku yang hak-hak tersebut diberikan hak penuh kepada para pihak yang bersengketa, dan hanya dalam

⁴ *Ibid.* Hal. 12.

⁵ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional-Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 40.

hal perdagangan saja jalur arbitrase dapat dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa.⁶

Para pihak yang bersengketa tidak dapat selalu terpuaskan dengan hasil dari putusan arbitrase, maka dari itu putusan arbitrase yang seharusnya bersifat terakhir dan mengikat para pihak yang bersengketa.⁷ Dapat diajukan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase yang diajukan kepada Pengadilan Negeri. Yang kemudian hasil dari putusan Pengadilan Negeri hanya bisa diajukan permohonan banding kepada Mahkamah Agung yang memiliki wewenang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.⁸

Upaya pembatalan putusan arbitrase diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang isinya adalah:

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui tidak asli atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

⁶ Pasal 5 ayat (1) dan (2), *Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, LN RI No. 138 Tahun 1999, TLN RI No. 3872.

⁷ Pasal 60, *Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, LN RI No. 138 Tahun 1999, TLN RI No. 3872.

⁸ Pasal 72 ayat (4), *Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, LN RI No. 138 Tahun 1999, TLN RI No. 3872.

- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Selain harus didasarkan pada alasan-alasan permohonan pembatalan, alasan-alasan permohonan tersebut juga harus terlebih dahulu dibuktikan dengan putusan pengadilan, untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana disebutkan diatas.

Pada dasarnya tanpa alasan yang spesifik, tidak mungkin untuk mengadili kembali suatu putusan arbitrase yang disebabkan oleh salah satu pihak yang tidak puas, karena permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase bukanlah merupakan suatu upaya hukum banding seperti yang disediakan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan untuk menjaga terpenuhinya asas putusan arbitrase yang bersifat *final and binding*.⁹

Kemudian disebutkan dalam Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, bahwa :

1. Permohonan terhadap pembatalan putusan arbitrase harus diajukan terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri.
2. Jika permohonan yang tersebut dalam ayat 1 dikabulkan, maka Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan sebagian atau seluruhnya mengenai putusan arbitrase tersebut.
3. Ketua Pengadilan Negeri yang menetapkan atas permohonan pembatalan paling lama dalam waktu satu bulan sesuai dengan yang ada dalam ayat 1 mulai terhitung dari permohonan diterima.

⁹ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. 2 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 106.

4. Kemudian pada putusan Pengadilan Negeri bisa mengajukan permohonan banding kepada MA yang memiliki kewenangan memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.
5. Sesuai dengan pasal 72 ayat 4 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Mahkamah Agung bisa mempertimbangkan dan memutuskan permintaan banding dengan jangka waktu paling lama satu bulan atau tiga puluh hari se usai permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

Dampak yang dapat ditimbulkan dari suatu pembatalan putusan arbitrase sangat besar, karena apabila terjadi pembatalan putusan arbitrase, maka kekuatan eksekutorial dari putusan arbitrase gugur dan kedudukan para pihak dalam persengketaan kembali pada keadaan semula. Menurut pasal 72 ayat 4 Undang-Undang No.30 tahun 1999 sendiri juga telah menjelaskan bahwa banding putusan atas permohonan pembatalan dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung. Untuk itu diperlukan adanya ketentuan yang mengatur dengan jelas tentang kewenangan pengadilan mana yang berhak memberikan putusan pembatalan putusan arbitrase, karena adanya kasus tentang pembatalan putusan arbitrase yang dilakukan oleh pengadilan selain Mahkamah Agung, supaya tidak mengganggu dasar/asas kepastian hukum dalam arbitrase.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis menemukan adanya kasus pembatalan putusan arbitrase yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yakni Putusan Pengadilan Tinggi JAKARTA Nomor 202/PDT/2015/PT.DKI Tahun

2015 yang menerima permohonan banding Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 262/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. tanggal 8 Januari 2013 yang pada dasarnya tidak sesuai dengan Pasal 72 ayat (4), Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi: “Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut hanya dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir”.

Terkait dengan penjelasan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENGADILAN PADA PUTUSAN ARBITRASE BERDASARKAN PASAL 72 AYAT 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Tinggi JAKARTA Nomor 202/PDT/2015/PT.DKI Tahun 2015).**

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana fungsi kewenangan pengadilan dalam pemberian putusan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase yang sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis fungsi kewenangan pengadilan dalam pemberian putusan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase yang sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

A. Manfaat Teoritis

Dapat menjadi bahan pembelajaran hukum, khususnya hukum arbitrase bidang perdata. Dapat pula menjadi referensi penelitian lain yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

B. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat menambah bahan rujukan bagi mahasiswa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya arbitrase.

b. Bagi Hakim

Dapat menjadi acuan dalam memberikan putusan tentang arbitrase sesuai dengan kewenangan hukum yang telah diatur di dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

c. Bagi Arbiter

Dapat menjadi acuan dan masukan dalam sikap serta usahanya menyelesaikan sengketa arbitrase yang telah di amanatkan oleh para pihak yang bersengketa.

d. Bagi Pemerintah, khususnya Dewan Legislatif

Dapat menjadi acuan pertimbangan untuk membuat rancangan undang-undang yang lebih spesifik mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa agar tercipta kepastian hukum.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini akan disusun dalam empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I yang berjudul pendahuluan berisikan gambaran umum mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II yang merupakan kajian pustaka berisi uraian tentang Pengertian tentang Arbitrase, Jenis Arbitrase, Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase, Dasar Hukum Arbitrase, Perjanjian Arbitrase, Kewenangan Arbitrase, dan Proses Penyelesaian Sengketa Arbitrase sesuai dengan UU Nomor 30 tahun 1999.

Bab III berjudul Metode Penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Metode penelitian yang digunakan bergantung kepada jenis penelitian yang dilakukan.

Bab IV merupakan bab yang memuat sistematika hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan urutan rumusan masalah, sehingga didapatkan suatu pemahaman yang menyeluruh atas hasil penelitian ini seperti yang diinginkan oleh penulis.

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran dari penulis bagi pihak

terkait yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Arbitrase

Metode penyelesaian konflik yang ada di luar lembaga peradilan umum disebut arbitrase, perjanjian tertulis yang dibuat oleh pihak-pihak yang mengalami konflik merupakan dasar dari arbitrase, dan dilakukan oleh arbiter yang merupakan dewan mandiri. Konflik yang harus diselesaikan tersebut berasal dari konflik atau sengketa atas sebuah kontrak dalam bentuk sebagai berikut:¹⁰

1. Pelanggaran perjanjian/kontrak (*breach of contract*), termasuk di dalamnya adalah:
 - a. Sah atau tidaknya kontrak;
 - b. Berlaku atau tidaknya kontrak;
2. Perbedaan penafsiran (*disputes*) mengenai pelaksanaan perjanjian berupa:
 - a. Pertentangan pendapat (*controversy*);
 - b. Kesalahan pahaman (*misunderstanding*);
 - c. Ketidaksepakatan (*unconcensus*).
3. Pengakhiran kontrak (*termination of contract*);

Arti dari arbitrase adalah kekuasaan untuk menyelesaikan suatu konflik menurut kebijaksanaan, berasal dari bahasa Latin yakni *arbitrare*.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 71.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa :

Tata cara menyelesaikan status persengketaan perdatayang dilakukan di luar pengadilan umum atas dasar perjanjian arbitrase kedua belah pihak yang dibuat secara tertulis, yang berwenang melakukan adalah arbiter/wasit oleh dewan yang mandiri.¹¹

Bisa disimpulkan karakteristik-karakteristik yuridis dari arbitrase atas dasar definisi mengenai arbitrase yang telah dijabarkan diatas, yakni sebagai berikut:¹²

- 1) Kedua belah pihak yang memiliki pertentangan/kontroversi;
- 2) Para pihak mengajukan pertentangan tersebut pada arbiter;
- 3) Pihak-pihak yang bersengketa atau badan tertentu yang menunjuk arbiternya;
- 4) Arbiter harus merupakan pihak yang tidak berkaitan dengan badan peradilan umum;
- 5) Perjanjian merupakan dasar dari pengajuan sengketa kepada arbitrase;
- 6) Pemeriksaan perkara dilakukan oleh arbiter;
- 7) Pemberian putusan oleh arbiter bersifat mengikat dan final kepada

¹¹ Indonesia (a), Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872, pasal 1 ayat (1).

¹² Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 13.

kedua belah pihak yang bersengkata, putusan diberikan sesudah perkara diperiksa.

Setelah melihat hal-hal diatas, bisa diketahui bahwa arbitrase itu adalah suatu metode penyelesaian sengketa yang diajukan secara tertulis oleh para pihak yang diselesaikan secara netral tanpa adanya keberpihakan oleh pihak ketiga atau arbiter. Arbiter memiliki kewenangan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa. Keputusan yang telah dikeluarkan arbitrase merupakan keputusan bersifat akhir serta mengikat para pihak (*final and binding*).¹³

2.2. Jenis Arbitrase

Jenis arbitrase yang telah diakui keberadaannya dan kewenangan untuk memeriksa serta memutuskan sengketa yang terjadi pada pihak yang mengadakan perjanjian terdiri dari arbitrase institusional dan arbitrase *ad hoc*.¹⁴

Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Konvensi New York 1958, arbitrase institusional (*institutional arbitration*) adalah lembaga arbitrase yang bersifat tetap (*permanent arbitral body*).¹⁵ Lembaga arbitrase ini merupakan wadah yang sengaja didirikan untuk menampung permasalahan yang timbul dari perjanjian.¹⁶ Pihak-pihak yang menginginkan penyelesaian konfliknya dilakukan oleh arbitrase bisa membuat perjanjian

¹³ Moch. Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)* (Bandung: Genta Publishing, 2011), hal. 15.

¹⁴ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 102.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 151.

agar putusan dari konflik atau sengketa mereka akan diputus oleh arbitrase institusional yang bersangkutan. Setelah konflik selesai dan telah diputus, arbitrase institusional tetap akan berdiri untuk membantu penyelesaian konflik-konflik lain.

Arbitrase institusional dalam pendiriannya adalah badan yang bersifat tetap atau permanen, ketentuan-ketentuan tentang tata cara penunjukan arbiter dan tata cara pemeriksaan sengketa serta organisasinya disusun dengan jelas.¹⁷ Dalam arti lain menyediakan jasa administrasi arbitrase mulai dari aturan-aturan prosedural sebagai pedoman bagi para pihak dan pengangkatan para arbiter, sampai pengawasan terhadap proses arbitrase itu sendiri.

Adapun terdapat beberapa arbitrase institusional, antara lain:¹⁸

- 1) Arbitrase yang ruang lingkup yurisdiksi dan keberadaannya hanya meliputi kawasan Negara yang bersangkutan yang bersifat nasional, seperti:
 - a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
 - b. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI);
 - c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS);
 - d. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI);
- 2) Arbitrase institusional yang bersifat internasional, yaitu arbitrase yang

¹⁷ Suyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, (Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2004), hal. 124-125.

¹⁸ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 53-54.

ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya bersifat internasional.

- 3) Arbitrase institusional yang bersifat regional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya berwawasan regional, misalnya *Regional Centre for Arbitration* yang didirikan oleh *Asia Afrika Legal Consultative Committee* (AALCC).

Adanya arbitrase diatas tercantum dalam pasal 34 UU No. 30 Tahun 1999. Berdasarkan kesepakatan atau consensus bersama pihak-pihak yang bersengketa dapat memilih penyelesaian sengketa dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional.¹⁹ Kecuali ditetapkan lain oleh para pihak, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan menurut peraturan dan lembaga yang dipilih.²⁰

Berbeda dengan arbitrase institusional, arbitrase *ad hoc* (*arbitrase volunteer*) yang keberadaannya akan berakhir atau bubar apabila sengketa yang ditangani selesai diputus. Arbitrase ini ada, diberikan kewenangan serta dibentuk khusus untuk menyelesaikan sengketa tertentu dalam waktu tertentu. Arbitrase *ad hoc* bersifat sewaktu-waktu (*incidental*) karena jangka waktunya akan selesai setelah sengketa diputuskan.²¹ Pelaksanaan pemilihan arbiter dapat diatur oleh para pihak yang bersengketa, namun hal penting yang harus dilakukan dalam pengangkatan arbiter, kedua pihak perlu memilih arbiter yang cakap dan kompeten, hal ini disebabkan oleh proses pemeriksaan

¹⁹ Indonesia (a), *Op. Cit.*, pasal 34 ayat (1).

²⁰ *Ibid.*, pasal 34 ayat (2).

²¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hal. 53.

arbitrase berlangsung tanpa adanya peninjauan dan pengawasan yang bersifat lembaga.

Sesuai dengan pasal 13 ayat 2 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, kedua belah pihak yang bertika dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam suatu arbitrase *ad-hoc* , apabila terdapat kata mufakat dalam menunjuk. Hal ini bertujuan untuk dapat menentukan apakah arbitrase yang disepakati para pihak merupakan jenis arbitrase *ad hoc* atau bukan, bisa dilihat pada rumusan klausula arbitrasenya yang menyatakan bahwa sengketa akan diselesaikan oleh arbitrase yang mandiri berdiri sendiri di luar arbitrase institusional atau arbitrase perorangan. Arbitrase *ad hoc* mempunyai ciri dasar yakni penunjukan secara individu para arbiternya, arbitrase *ad hoc* bersifat tidak terkait serta terikat dengan badan arbitrase lainnya yang bersifat institusional. Dapat disimpulkan jenis arbitrase *ad-hoc* tidak memiliki cara tersendiri atau aturan tentang tata cara pemeriksaan sengketa.²²

2.3. Kekurangan Arbitrase

Arbitrase memiliki beberapa kekurangan diantaranya yaitu:

- 1 Sulitnya menyatukan keinginan pihak-pihak yang bersengketa karena tidak adanya kata mufakat dari pihak-pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase.
- 2 Tidak mudahnya pelaksanaan serta pengakuan putusan arbitrase asing di negara-negara tertentu.

²² Suyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, (Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2004), hal. 123.

- 3 Adanya keputusan-keputusan yang saling bertentangan (*conflicting decisions*) akibat dari tidak adanya keterikatan antara putusan-putusan arbitrase sebelumnya atau preseden hukum (*legal precedent*) dalam arbitrase. Meskipun terdapat putusan-putusan sebelumnya yang berisi argumentasi hukum para ahli-ahli hukum kompeten dan ternama, putusan tersebut tidak dijadikan acuan dan dibuang begitu saja.
- 4 Keputusan arbitrase hanya bergantung pada arbitrator yang dapat memuaskan pihak-pihak yang bersengketa, hal ini tentu tidak dapat memberikan jawaban yang pasti atau definitif terhadap semua sengketa hukum, karena di setiap negara tentu memiliki konsep yang berbeda-beda pula.

Beberapa keberatan dalam menyelesaikan sengketa juga diungkapkan oleh Stein, diantaranya yaitu:²⁸

1. Terdapat kemungkinan biaya dalam peradilan arbitrase lebih mahal, karena honorarium untuk pihak-pihak yang ikut menyelesaikan sengketa arbitrase berbeda-beda tergantung kerumitan suatu sengketa serta kualitas dan tingkatan arbiternya yang tentunya akan menambah biaya;
2. Pihak-pihak yang bersengketa pada umumnya menggunakan pengacara, walaupun tidak adanya kewajiban adanya suatu perwakilan dalam proses arbitrase.²³

Kemudian putusan arbitrase tidak dapat diganggu gugat karena bersifat *final and binding*, hal ini akan menjadi suatu permasalahan apabila terdapat pihak yang tidak dapat menerima putusan, pihak yang merasa

²³ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 14-15.

dikalahkan melakukan upaya hukum di pengadilan untuk menganggap tidak sah atau menganulir putusan. Adanya opini yang demikian tersebut sehingga dikatakan bahwa arbitrase itu baik dan efektif hanya untuk para pengusaha yang dapat dipercaya dengan baik (*bonafide*) dan beritikad baik.²⁴

2.4. Kelebihan Arbitrase

Penyelesaian konflik melalui pengadilan (*litigasi*) sudah umum dipergunakan para pihak yang bersengketa. Akan tetapi proses penyelesaian penyelesaian melalui litigasi banyak dikritik karena dianggap tidak efektif dan tidak efisien.²⁵ Dengan harapan memperoleh hasil penyelesaian sengketa yang lebih baik, pihak-pihak tertentu lebih memilih penyelesaian konflik melalui arbitrase. Adapun beberapa kritik yang umum disampaikan kepada pengadilan diantaranya adalah :

1. Proses litigasi memerlukan waktu lama, sangat lamban dan tidak tepat waktu. Dengan biaya yang mahal dan dapat merugikan pihak yang memiliki kebenaran kuat karena proses peradilan dari tingkat pertama sampai akhir yakni Mahkamah Agung yang panjang.²⁶ Berbeda dengan arbitrase yang relatif cepat karena arbitrase merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir, sehingga kepastian hukum dari

²⁴ *Ibid.*

²⁵ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 151.

²⁶ Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan* (Jakarta: Chandra Pratama, 2000), hal. 1.

permasalahan cepat didapat oleh pihak-pihak yang bersengketa.²⁷

Dengan begitu biaya dapat dikurangi. Arbitrase memiliki tata cara yang lebih bersifat informal dari tata cara litigasi, terbuka untuk memperoleh dan tersedianya tata cara penyelesaian yang kekeluargaan, ramah dan damai (*amicable*).

2. Kepentingan umum dan kebutuhan masyarakat sering terabaikan di pengadilan, karena tidak cepat tanggapnya respon pengadilan.
3. Pengadilan menempatkan pihak-pihak yang berkonflik pada dua sisi yang berhadapan, ada pihak yang menang dan kalah dalam posisi tersebut. Hal ini dapat menimbulkan dendam, kebencian serta amarah setelah putusan ditetapkan.²⁸

Jalur litigasi dilakukan secara terbuka dan disiarkan di media masa yang mungkin dapat berakibat terhadap penilaian buruk bagi pihak-pihak yang bersengketa. Dari hal tersebut mengakibatkan banyak pengusaha lebih memilih menyelesaikan sengketa dagang yang timbul di antara mereka melalui arbitrase dibandingkan dengan pengadilan.

Kelebihan arbitrase jika dibandingkan dengan pengadilan konvensional, yaitu:²⁹

1. Pihak-pihak yang berkonflik dapat saling menjamin kerahasiaan;
2. Dapat dihindarinya keterlambatan yang diakibatkan karena prosedur dan administrasi;

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 411.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 156-157.

²⁹ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Penjelasan Umum.

3. Pihak-pihak yang berkonflik bisa memilih dan menunjuk sendiri berdasarkan keyakinan mereka bahwa arbiter mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang memadai mengenai masalah yang dipersengketakan, jujur dan adil;
4. Pihak-pihak yang berkonflik bisa memilih tempat dan proses penyelenggaraan arbitrase untuk menyelesaikan masalah;
5. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan melalui tatacara atau prosedur yang sederhana dan langsung dapat dilaksanakan.

Selain itu, meskipun putusan arbitrase mengikat para pihak dan dapat langsung dilaksanakan, namun pada kenyataannya masih terdapat hambatan-hambatan yang dialami dalam proses pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase baik nasional maupun internasional. Kelebihan arbitrase terhadap pengadilan yang paling dirasakan adalah sifat kerahasiaannya karena hasil keputusannya tidak dipublikasikan. Sifat rahasia arbitrase ini dapat melindungi para pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang merugikan disebabkan adanya pengungkapan informasi bisnis kepada umum.

2.5. Dasar Hukum Arbitrase

1. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Perkembangan yang pesat dalam dunia usaha dan lalu lintas perdagangan baik nasional maupun internasional serta dalam bidang hukum pada umumnya, mengakibatkan peraturan yang ada di *Reglement op de Rechtsvordering* sudah tidak sesuai lagi, meskipun sebelumnya

diperuntukkan untuk acuan arbitrase sehingga perlu diberikan penyesuaian.³⁰ Pembentukan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah usaha yang didasarkan atas perjanjian tertulis pihak-pihak yang berkonflik untuk penyelesaian konflik di luar pengadilan umum. Hanya Konflik mengenai hak yang menurut hukum didasari sepenuhnya dari pihak-pihak yang berkonflik atas dasar persetujuan yang dapat diselesaikan melalui UU No. 30 Tahun 1999 mengakibatkan ketentuan-ketentuan yang lama gugur dengan sendirinya dan digantikan oleh undang-undang tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh MA serta badan-badan peradilan yang terdapat di bawah MA di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi.³¹ Akan tetapi diberikan penegasan juga terhadap usaha dalam penyelesaian sengketa perdata bisa dilakukan juga lewat arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya, ini menunjukkan dibenarkannya peran arbitrase dalam tata hukum Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.

2.6. Perjanjian Arbitrase

Pemeriksaan arbitrase berdasarkan kemauan sendiri dari pihak-pihak yang ingin sengketanya terselesaikan melalui arbitrase. Kedua belah pihak yang bersengketa melakukan kesepakatan atau konsensus kata yang termuat dalam

³⁰ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Penjelasan Umum.

³¹ Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 1999, LN. No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5067, pasal 18.

suatu perjanjian, hal ini merupakan alasan utama dari arbitrase.³² Asas kebebasan berkontraklah yang melahirkan kesepakatan para pihak untuk mengadakan arbitrase. Asas kebebasan berkontrak di bidang kontrak perdagangan, sudah diakui oleh hampir seluruh negara di dunia. Kebebasan berkontrak merupakan kekuatan moral di belakang kontrak sebagai janji yang harus ditepati para pihak. Kedua belah pihak terikat dengan kontrak yang sudah dibuat dan dipilih sendiri oleh mereka (*the moral force behind contract as promise. The parties are bound to their contract because they have chosen to be*).³³ Kebebasan kedua belah pihak dalam pembuatan perjanjian yang bersifat internasional untuk memilih hukum negara mana yang berlaku dan memilih lembaga atau badan pengadilan atau arbitrase, untuk penyelesaian sengketa yang mungkin nantinya akan ada dari proses atau pelaksanaan untuk menjabarkan arti dari kontrak itu sendiri, telah memperoleh pengakuan hampir secara universal.³⁴

Apabila dalam suatu kontrak tidak terdapat suatu perjanjian arbitrase, maka penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak dapat dilakukan. Inti perjanjian arbitrase adalah ditujukan kepada masalah penyelesaian konflik yang timbul dari perjanjian. Kedua belah pihak dapat menentukan kata sepakat agar penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian tidak diajukan dan diperiksa oleh badan peradilan resmi, tetapi akan diselesaikan oleh

³² Sudargo Gautama, *Aneka Hukum Arbitrase (Ke Arah Hukum Arbitrase Indonesia yang Baru)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 27.

³³ K. M. Sharma, "From Sancity to fairness: An Eneasy Transition in the Law of Contracts?", *New York School of Journal of International and Comparatively Law*, Vol. 18 No. 2, 1999, hal. 95, sebagaimana dikutip oleh Yansen Dermanto Latip, *Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Kontrak Internasional* (Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2002), hal. 11.

³⁴ Peter Nygh, *Autonomy in International Contracts* (Oxford: Clarendo Press, 1999), hal. 13

sebuah wadah atau badan kuasa swasta yang bersifat netral yang secara umum disebut wasit atau arbitrase.³⁵

Sumber utama kewenangan dari peradilan arbitrase pada dasarnya berasal dari fungsi utama perjanjian arbitrase. Jadi prinsip dari suatu peradilan arbitrase tersebut adalah hanya bisa melaksanakan kekuasaan apabila pihak-pihak yang bersengketa menyetujui untuk memberikan kekuasaan. Kesepakatan para pihak yang tertuang dalam perjanjian arbitrase juga memberlakukan prinsip tersebut. Kesepakatan inilah yang melahirkan fungsi kewenangan suatu badan arbitrase.

Perjanjian arbitrase adalah sebagai jaminan dalam perjanjian yang mengharuskan pelepasan penguasaan atas benda atau hutang piutang (perjanjian aksesoir), dan tidak melekat menjadi satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya. Perjanjian arbitrase ini hanya merupakan perjanjian tambahan yang sering disebut klausula arbitrase, karena keberadaannya merupakan perjanjian tambahan, perjanjian arbitrase tidak mempengaruhi pelaksanaan perjanjian pokoknya. Dengan demikian perjanjian pokok tidak akan batal atau cacat tanpa adanya klausula arbitrase.³⁶

Sebagai suatu perjanjian aksesoir, perjanjian arbitrase harus mengikuti prinsip-prinsip hukum kontrak aksesoir yang berlaku yakni: isinya tidak boleh bertentangan dengan perjanjian pokoknya, tidak boleh melewati perjanjian pokoknya, dan tidak ada tanpa adanya perjanjian pokok. Sungguhpun pada prinsipnya kontrak/perjanjian arbitrase merupakan suatu kontrak buntutan

³⁵ *Ibid.*, hal. 61.

³⁶ H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase, Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 71.

(*accessoir*), tetapi ada beberapa sifatnya yang unik, yang menyebabkan sifatnya sebagai *accessoir* tersebut tidak diikuti secara penuh. contoh: jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian arbitrase tidak ikut-ikutan menjadi batal (lihat Pasal 10 huruf h UU No. 30 Tahun 1999).³⁷

Keadaan yang menyebabkan suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal adalah tersebut dibawah ini:

- a. salah satu pihak meninggal;
- b. salah satu pihak bangkrut atau pailit ;
- c. novasi;
- d. salah satu pihak insolvensi;
- e. proses mewariskan/pewarisan;
- f. berlakunya tuntutan atau syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
- g. diperlukan persetujuan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian arbitrase, apabila kedua belah pihak ingin mengalihkan tugas tentang pelaksanaan perjanjian pada pihak lain atau ketiga;
- h. perjanjian pokok yang telah berakhir atau batal.

Penjelasan dalam Pasal 10 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terutama yang ada di butir huruf f dan h, berhubungan dengan adanya prinsip keterpisahan (*separability princip*) dalam suatu perjanjian arbitrase, yaitu kontrak atau klausula arbitrase berdiri independen dan

³⁷ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 119.

terlepas sama sekali dengan perjanjian pokoknya. Dikarenakan alasan apapun apabila perjanjian pokoknya dianggap cacat hukum atau tidak syah, maka kontrak atau klausula arbitrase tetap dianggap syah dan mengikat.³⁸

Adapun bentuk dari perjanjian arbitrase terbagi menjadi 2 (dua), yaitu 1) *pactum de compromittendo*, kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin akan timbul di kemudian hari melalui arbitrase. Pokok yang penting dalam hal ini antara lain: diperbolehkan untuk membuat persetujuan di antara para pihak yang membuat persetujuan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari kepada arbitrase.³⁹ Bentuk klausula *pactum de compromittendo* diatur dalam Pasal 7 UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan: “Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan jika kedua belah pihak sepakat suatu sengketa yang sudah atau akan terjadi antara kedua belah pihak untuk diselesaikan secara arbitrase”. Untuk cara yang dilakukan dalam pembuatan klausula *pactum de compromittendo* yakni:⁴⁰

- a. Yang telah menjadi kebiasaan dan sering dilakukan yaitu dengan mencantumkan klausula arbitrase yang bersangkutan dalam perjanjian pokok.
- b. Klausula *pactum de compromittendo* dibuat secara terpisah dalam akta tersendiri.

³⁸ *Ibid.*, hal. 117.

³⁹ M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, hal. 65.

⁴⁰ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hal. 48.

Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara istilah *pactum de compromittendo* dan akta kompromis karena keduanya mempunyai akibat hukum, yaitu:⁴¹

- a. tidak diperlukan penyelesaian sengketa melalui prosedur gugat-menggugat dan pemeriksaan ulang terhadap putusan oleh pengadilan lebih tinggi atau naik banding, hal ini di akibatkan oleh sengketa yang akan atau telah timbul tidak akan diperiksa dan diputus oleh pengadilan;
- b. Arbiterlah yang akan memeriksa dan memutus tentang sengketa yang ada, dimana pihak-pihak yang bersengketa memiliki kewajiban untuk turut andil pada lancarnya dan terlaksananya arbitrase, serta menaati putusan yang dijatuhkan.

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian pada waktu membahas perjanjian harus dengan cermat ketika menyusun klausula arbitrase yang luas dan lengkap atau komprehensif. Tidak diharuskan klausula tersebut panjang dan rumit, namun perlu berisi komitmen atau keterikatan satu sama lain yang jelas terhadap arbitrase serta pernyataan tentang sengketa apa yang diselesaikan secara arbitrase agar dapat berhasil secara efektif. Karena hukum dalam suatu yuridiksi dapat berubah setiap saat, para pihak kadang kala menuntut adanya klausul *stabilisasi* yang menetapkan majelis arbitrase untuk mengabaikan perubahan-perubahan setelah perjanjian/kontrak dalam undang-undang negara tersebut. Hal ini melindungi kepentingan para pihak dari perubahan-perubahan hukum yang mungkin sangat mempengaruhinya. Bilamana salah satu pihak yang mengadakan kontrak adalah pemerintah atau

⁴¹ Gatot Soemartono, *Op. Cit.*, hal. 32.

badan/lembaga pemerintah, para pihak sebaiknya mempertimbangkan penambahan suatu klausul yang menetapkan pelepasan hak kekebalan pemerintah yang sesuai bagi pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase, dan pelepasan hak kekebalan yang sama terhadap penyitaan atau eksekusi.

2.7. Kewenangan Arbitrase

Arbitrase merupakan lembaga sukarela (*volunteer*) yang dipilih dan ditunjuk berdasarkan persetujuan para pihak apabila mereka menghendaki penyelesaian persengketaan yang timbul diantara mereka diputus oleh seorang atau beberapa orang arbiter yang akan bertindak sebagai pemutus yang netral atau tidak memihak, dengan hasil akhir berupa putusan yang bersifat *final and binding*. Ditinjau dari segi penunjukan arbiter yang akan duduk menjalankan fungsi dan kewenangan arbitrase, memperlihatkan kedudukan dan keberadaannya tiada lain daripada badan swasta atau pribadi/privat. Arbitrase bukan badan kekuasaan peradilan (*judicial power*) resmi yang sengaja didirikan oleh kekuasaan negara berdasarkan konstitusi ketatanegaraan dari negara yang bersangkutan. Oleh karena arbitrase bukan badan peradilan resmi, menyebabkan lazimnya disebut sebagai penengah atau juru pisah persengketaan. Seolah-olah dalam menjalankan fungsi dan kewenangan memutus sengketa, bukan mengadili, akan tetapi lebih kearah menyelesaikan sengketa.⁴² Memperhatikan sifat arbitrase sebagai lembaga *volunteer* atau *extra judicial*, maka perlu dikaji mengenai kewenangan yang dimilikinya untuk memeriksa suatu sengketa.

⁴² M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 83.

Pada awalnya terdapat 2 (dua) aliran tentang kewenangan arbitrase. Pertama, aliran yang menyatakan bahwa klausula arbitrase bukan pesanan umum (*public order*) atau bukan ketertiban umum (*niet van openbaar order*), klausula arbitrase tidak seutuhnya menyingkirkan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang timbul dari perjanjian. Klausula arbitrase hanya memberikan hak opsi atau hak pilih bagi para pihak. Para pihak dapat memilih, apakah sengketa yang timbul diajukan kepada badan arbitrase atau ke pengadilan. Apabila salah satu pihak mengajukan persengketaan kepada badan arbitrase, baru mutlak gugur yurisdiksi Pengadilan Negeri untuk menerima, memeriksa dan mengadili. Sebaliknya, apabila salah satu pihak telah mengajukan persengketaan kepada Pengadilan Negeri, dengan sendirinya gugur kewenangan badan arbitrase untuk menyelesaikan dan memutusnya.⁴³

Aliran yang kedua menyatakan bahwa klausula arbitrase merupakan *pacta sunt servanda*. Makna dari asas ini adalah setiap perjanjian yang sah (*legal agreement*) mengikat kepada para pihak atau perjanjian harus dijaga (*agreement or promise must be kept*), oleh karena itu para pihak harus mentaatinya. Hal ini digariskan dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menentukan semua persetujuan yang dibuat secara syah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Klausula arbitrase sebagai persetujuan atau kesepakatan yang dituangkan para pihak dalam perjanjian,

⁴³ *Ibid.*, hal. 84.

berlaku sepenuhnya penerapan *pacta sunt servanda* dan Pasal 1338 KUH Perdata, dengan penerapan sebagai berikut:⁴⁴

- a. para pihak terikat seutuhnya atau mutlak kepada persetujuan arbitrase;
- b. oleh karena itu, apabila timbul sengketa dari apa yang telah mereka perjanjikan, kewenangan untuk menyelesaikan dan memutus sengketa mutlak menjadi kewenangan badan arbitrase;
- c. dengan demikian, pengadilan tidak memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa secara mutlak;
- d. apabila para pihak secara tegas menarik kembali kesepakatannya, maka klausa arbitrase menjadi gugur;
- e. hukum penarikan tidak dibenarkan dilakukan secara diam-diam, apalagi penarikan dilakukan secara sepihak atau unilateral.

Aliran ini cukup banyak dianut oleh pengadilan-pengadilan antara lain dalam Putusan Mahkamah Agung RI. No. 3179 K/Pdt/1984, yang menentukan bahwa hanya dengan perjanjian yang tegas dan ditandatangani kedua belah pihaklah suatu klausula arbitrase dapat dikesampingkan.⁴⁵

Dengan berlakunya UU No. 30 Tahun 1999, maka perbedaan aliran tersebut di atas secara yuridis menjadi hilang karena Pasal 11 UU No. 30 Tahun 1999 yang menegaskan:

1. Apabila para pihak tidak mendapat kata sepakat mengenai hal-hal yang termuat dalam perjanjian dan ingin mengajukan penyelesaian konflik,

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 88.

⁴⁵ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 122.

namun apabila terdapat suatu perjanjian tertulis, maka dapat meniadakan hak para pihak;

2. Terkecuali pada hal-hal tertentu yang ada di dalam UU ini. Penyelesaian sengketa yang sudah diputus oleh arbitrase wajib ditolak dan tidak diperbolehkan turut campurnya Pengadilan Negeri.

Atas dasar ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, bisa dikatakan jika terdapat suatu konflik dan kedua pihak membawanya ke Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri harus menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki wewenang secara *ambtshalve* (jabatan). Jadi tidak perlu pengajuan eksepsi oleh pihak tergugat mengenai kewenangan dari suatu pengadilan. Pengadilan atas inisiatif sendiri pun karena jabatan wajib menyatakan tidak memiliki wewenang.⁴⁶

Pada perjanjian arbitrase kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan untuk memberikan persoalan penyelesaian sengketa kedua belah pihak tersebut kepada salah satu dari arbitrase *ad hoc* ataupun arbitrase institusional. Arbitrase *ad hoc* adalah arbitrase yang ada untuk penyelesaian sengketa tertentu, sedangkan badan arbitrase institusional merupakan arbitrase permanen yang menerima tugas-tugas penyelesaian sengketa jika ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak yang berperkara. BANI adalah yang melakukan Arbitrase institusional di Republik Indonesia.

Selain adanya perjanjian arbitrase, maka kewenangan arbitrase untuk memutus suatu sengketa terwujud dalam penunjukan arbiter yang nantinya

⁴⁶ Sudargo Gautama, *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 15.

berwenang memeriksa dan memutus sengketa. Agar suatu proses arbitrase dapat berjalan dengan baik, maka umumnya para pihak berhak menunjuk arbiter yang akan mengadili sengketa dan, arbiter yang ditunjuk tersebut harus menerima penunjukan tersebut. Pada prinsipnya, dengan adanya penunjukan arbiter dari para pihak dan penerimaan arbiter yang bersangkutan, maka telah terjadi suatu perjanjian perdata.⁴⁷

2.8. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

Dalam suatu proses arbitrase pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Negosiasi

Yang dimaksudkan adalah negosiasi yang dilakukan pihak-pihak untuk memperoleh kesepakatan bahwa jika kelak timbul sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase.⁴⁸ Para pelaku bisnis lazimnya mengawali hubungan bisnis dengan pembuatan suatu perjanjian. Sebelum penandatanganan perjanjian terlebih dahulu diadakan perundingan mengenai hal-hal apa saja yang akan disepakati. Salah satu bagian yang menjadi objek negosiasi tersebut adalah apabila di kemudian hari timbul sengketa, bagaimana cara penyelesaian sengketa tersebut. Apabila para pihak menghendaki agar sengketa diselesaikan melalui arbitrase, maka hal tersebut haruslah terlebih dahulu disepakati oleh para pihak atau disebut juga dengan perjanjian arbitrase

⁴⁷ Indonesia (a), *Op. Cit.*, pasal 17 ayat (1).

⁴⁸ Catur Irianto, *Pelaksanaan Klausula-Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Bisnis* (Bandung: Inti Media Pustaka, 2007), hal. 56.

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 30 Tahun 1999. Selanjutnya dalam tahap negosiasi ini para pihak dapat menyepakati hal-hal sebagai berikut:⁴⁹

- a. Penentuan Aturan yang dipilih, apakah menggunakan peraturan prosedur (*rule*) ICC, UNCITRAL Arbitration, atau peraturan BANI;
- b. Penentuan bentuk arbitrase, apakah akan digunakan arbitrase *ad hoc* atau arbitrase konstitusional;
- c. Penentuan susunan arbiter. Namun apabila dalam perjanjian arbitrase para pihak tidak menentukan susunan arbiter maka hal tersebut akan ditentukan menurut peraturan prosedur arbitrase yang diberlakukan dan dipilih oleh para pihak;

2. Tahap Pemeriksaan

Pada tahap ini meliputi hal-hal antara lain:

- a. Dalam hal timbul sengketa, salah satu pihak (Pemohon) harus memberitahukan kepada pihak lainnya (Termohon) bahwa syarat yang diadakan oleh para pihak berlaku.⁵⁰
- b. Pemohon menyampaikan surat tuntutan kepada arbiter atau majelis arbitrase secara tertulis dengan memuat sekurang-kurangnya: nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak, uraian singkat tentang sengketa, lampiran bukti-bukti, dan isi tuntutan yang jelas;⁵¹
- c. Arbiter atau majelis arbitrase menyampaikan satu salinan tuntutan kepada Termohon dengan disertai perintah agar Termohon

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 57

⁵⁰ Indonesia (a), *Op. Cit.*, pasal 8.

⁵¹ *Ibid.*, pasal 38.

memberikan Jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 14 hari sejak diterimanya salinan tuntutan oleh Termohon;⁵²

- d. Selanjutnya, arbiter atau majelis arbitrase memerintahkan agar para pihak atau kuasanya hadir menghadap di persidangan pada waktu yang telah ditentukan. Apabila Pemohon tanpa suatu alasan yang tidak syah tidak datang padahal telah dipanggil secara baik, maka suratuntutannya dianggap gugur dan tugas arbiter atau majelis arbitrase dianggap selesai. Apabila Termohon yang tidak datang tanpa suatu alasan yang tidak syah padahal telah dipanggil secara baik, maka arbiter atau majelis hakim sekali lagi melakukan panggilan;⁵³
- e. Pada sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak atau kuasanya, arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian. Jika telah tercapai, dibuatlah akta perdamaian oleh arbiter atau majelis arbitrase yang final dan mengikat para pihak.⁵⁴ Bila tidak maka pemeriksaan harus terus dilanjutkan terhadap pokok sengketa.⁵⁵
- f. Atas perintah arbiter atau majelis arbitrase atau atas permintaan para pihak, dapat dipanggil saksi ataupun saksi ahli untuk didengar keterangannya.⁵⁶
- g. Pemeriksaan sengketa harus diselesaikan paling lama dalam waktu 6 bulan atau seratus delapan puluh hari mulai dihitung saat terbentuknya arbiter atau majelis arbitrase.⁵⁷

⁵² *Ibid.*, pasal 39.

⁵³ *Ibid.*, pasal 43 dan 44.

⁵⁴ *Ibid.*, pasal 45.

⁵⁵ *Ibid.*, pasal 46.

⁵⁶ *Ibid.*, pasal 49.

⁵⁷ *Ibid.*, pasal 48.

- h. Jika pemeriksaan dianggap sudah cukup, maka arbiter atau majelis arbitrase akan menjatuhkan putusan arbitrase, yang sifatnya final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

3. Tahap Pelaksanaan Putusan Arbitrase

UU No. 30 Tahun 1999 mengatur pelaksanaan putusan tentang arbitrase nasional sebagai berikut:

- a. Putusan arbitrase bersifat *final* and *binding* sehingga dapat langsung dilaksanakan. Namun apabila para pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka putusan arbitrase dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua pengadilan Negeri atau permohonan salah satu pihak yang berselisih.⁵⁸
- b. Ketua Pengadilan Negeri memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase sudah sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta tidak adanya pertentangan antara putusan arbitrase dan norma kesusilaan serta kepentingan umum. Jika putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan yang telah disebutkan, maka ketua Pengadilan Negeri bisa tidak menerima permohonan eksekusi.⁵⁹

Untuk eksekusi putusan arbitrase internasional, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur sebagai berikut:

⁵⁸ *Ibid.*, pasal 61.

⁵⁹ *Ibid.*, pasal 62.

- a. Pengadilan Jakarta Pusat adalah pengadilan yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.⁶⁰
- b. Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan dan diakui di wilayah Indonesia, jika putusan arbitrase internasional dijatuhkan arbitrer atau majelis arbitrase di suatu Negara yang terikat dengan Negara Indonesia pada perjanjian tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Terbatasnya putusan arbitrase internasional pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.⁶¹

Pasal 3 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa melarang terlibatnya Pengadilan Negeri untuk mengadili konflik dimana para pihaknya telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Akan tetap, hal ini tidak mengartikan bahwa peran pengadilan dalam pelaksanaan arbitrase tertutup sama sekali. UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur peran pengadilan di negara ini untuk memperkuat proses arbitrase sejak awal hingga pelaksanaan putusan arbitrase. Dalam Pasal 11 ayat 1 yang isinya adalah, apabila terdapat suatu perjanjian arbitrase yang tertulis, maka menghilangkan hak-hak kedua belah pihak untuk mengajukan penyelesaian konflik atau beda pendapat kepada Pengadilan Negeri. Dituangkan kemudian dalam ayat 2 pasal tersebut bahwa tidak boleh ikut campurnya Pengadilan Negeri dalam penyelesaian konflik

⁶⁰ *Ibid.*, pasal 65.

⁶¹ *Ibid.*, pasal 66.

serta keharusan untuk menolak penyelesaian sengketa yang telah diputuskan oleh arbitrase, namun terdapat hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang yang bisa dikecualikan. Peran pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 pada prinsipnya meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

A. Pada saat proses arbitrase

Peran pengadilan pada saat proses arbitrase berlangsung terlihat dalam Pasal 13. Perihal kedua belah pihak yang bersengketa tidak bisa mendapatkan kata mufakat perihal pemilihan arbiter atau perihal pengangkatan arbiter yang tidak ada ketentuan yang dibuat, maka yang menunjuk arbiter atau majelis arbitrase adalah Ketua Pengadilan Negeri.⁶² Kemudian, perihal kedua belah pihak sudah mencapai kata mufakat perihal konflik yang terjadi, konflik tersebut akan diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, maka kedua belah pihak harus mencapai kata mufakat perihal arbiter tunggal terpilih yang diangkat. Tetapi jika dalam batas waktu empat belas hari setelah termohon menerima usul pemohon, kedua belah pihak tidak berhasil memilih arbiter tunggal, berdasarkan permintaan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri bisa mengangkat arbiter tunggal.⁶³ Pengangkatan arbiter tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri didasarkan atas daftar arbiter yang diberikan oleh kedua belah pihak, atau yang didapat dari lembaga atau organisasi arbitrase yang ada, tentunya harus diperhatikan baik-baik masalah rekomendasi

⁶² Indonesia (a), *Op. Cit.*, pasal 13 ayat (1).

⁶³ *Ibid.*, pasal 14 ayat (3).

ataupun keberatan yang diajukan oleh kedua belah pihak terhadap yang bersangkutan.⁶⁴

Adakalanya dalam beberapa permasalahan arbiter yang ditunjuk telah bersedia, tetapi kemudian mengundurkan diri menjadi arbiter. Jika kedua belah pihak bisa setuju masalah permintaan pengunduran diri tersebut, maka yang bersangkutan bisa membebaskan diri dari tugas sebagai arbiter. Tetapi apabila permintaan pengunduran diri tidak mendapat persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa, maka pembebasan tugas arbiter dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri.⁶⁵

Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan hak ingkar apabila terdapat cukup alasan dan bukti nyata yang dalam bukti tersebut menumbuhkan ketidakpercayaan bahwa arbiter terpilih bisa melaksanakan tugasnya secara tidak bebas dan malah berpihak pada salah satu pihak yang bersengketa dalam mengambil putusan, atau jika terdapat bukti hubungan keluarga, finansial, atau hubungan kerja dengan salah satu pihak terkait atau kuasanya.⁶⁶ Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.⁶⁷ Selanjutnya, masalah tuntutan ingkar arbiter yang diajukan oleh salah satu pihak yang tidak disetujui oleh pihak lainnya dan arbiter terpilih tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan bisa mengajukan tuntutan

⁶⁴ *Ibid.*, pasal 14 ayat (4).

⁶⁵ *Ibid.*, pasal 19 ayat (4).

⁶⁶ *Ibid.*, pasal 22 ayat (1) dan (2).

⁶⁷ *Ibid.*, pasal 23 ayat (1).

kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua belah pihak dan tidak bisa diajukan perlawanan.⁶⁸

B. Waktu pelaksanaan putusan arbitrase

Pengadilan Negeri juga memiliki peran menjadi tempat pendaftaran putusan arbitrase dalam rangka pelaksanaan putusan arbitrase nasional.⁶⁹ Adakalanya pihak yang harus melaksanakan putusan arbitrase tidak bersedia melaksanakannya secara sukarela. Dalam hal ini, Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan agar pihak yang bersangkutan melaksanakan putusan arbitrase.⁷⁰ Perintah tersebut berdasarkan permohonan eksekusi yang didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri, dan diberikan paling lama dalam waktu satu bulan setelah permohonan didaftarkan. Ketua Pengadilan Negeri wajib memeriksa dahulu terpenuhinya ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 dalam putusan arbitrase tersebut, sebelum perintah pelaksanaan diberikan, serta ada tidaknya pertentangan putusan tersebut dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam hal ketentuan-ketentuan tersebut tidak terpenuhi, Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.⁷¹

Kemudian, dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase internasional, peran pengadilan terhadap arbitrase juga dapat kita lihat. Hal ini di atur dalam Pasal 65 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berisi tentang

⁶⁸ *Ibid.*, pasal 25 ayat (1).

⁶⁹ *Ibid.*, pasal 59.

⁷⁰ *Ibid.*, pasal 61.

⁷¹ *Ibid.*, pasal 62.

kewenangan Pengadilan Jakarta Pusat dalam menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Sesudah mendapatkan eksekutor yang diperoleh dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, suatu putusan arbitrase internasional baru dapat dilaksanakan di Indonesia, untuk hal yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam konflik tersebut, hanya dapat dilaksanakan apabila telah diberikan eksekutor oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kemudian dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁷² Untuk permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dapat dilakukan apabila putusan tersebut sudah diberikan dan didaftarkan oleh arbiter terpilih atau kuasanya terhadap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁷³

Atas dasar ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan diatas, pengadilan telah diminta untuk ikut campur apabila suatu proses arbitrase sudah selesai dan salah satu dari pihak-pihak yang bersengketa tidak memiliki niatan atau bersedia melaksanakan putusan arbitrase tersebut. Yang harus memaksa pihak yang menolak putusan arbitrase untuk mematuhi putusan arbitrase adalah Lembaga Peradilan, lembaga arbitrase tidak dapat memaksakan pelaksanaan putusan arbitrase.⁷⁴

C. Jika terjadi pembatalan putusan arbitrase, Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah mengatur tentang kemungkinan terjadinya pembatalan terhadap putusan arbitrase oleh pengadilan, apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

⁷² *Ibid.*, pasal 66.

⁷³ *Ibid.*, pasal 67 ayat (1).

⁷⁴ Erman Rajagukguk, *Op. Cit.*, hal. 4.

- 1) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- 2) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- 3) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Waktu yang diberikan paling lama satu bulan dimulai saat penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase tentang pengajuan permohonan atas pembatalan putusan arbitrase secara kepada Panitera Pengadilan Negeri dan dilakukan secara tertulis.⁷⁵ Pengajuan terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan pada Ketua Pengadilan Negeri. Jika dikabulkan, maka Ketua Pengadilan Negeri yang dapat menentukan lebih lanjut bagaimana akibat pembatalan sebagian atau seluruhnya putusan arbitrase. Terhadap putusan arbitrase yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri bisa diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang akan memberikan putusan dalam tingkat pertama dan terakhir.⁷⁶

⁷⁵ *Ibid.*, pasal 71.

⁷⁶ *Ibid.*, pasal 72.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni suatu proses untuk menemukan suatu prinsip hukum, aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk membantu menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, hal ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi penulis.⁷⁷

Kemudian bentuk dari hasil penelitian ini akan dituangkan secara deskriptif. Penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran yang teliti tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya⁷⁸, yang dalam penelitian ini dibatasi mengenai kewenangan pengadilan pada suatu putusan arbitrase berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya berkaitan dengan Putusan Pengadilan Tinggi JAKARTA Nomor 202/PDT/2015/PT.DKI Tahun 2015 yang akan digunakan sebagai objek penelitian. Dengan pendekatan tersebut, maka akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang akan dicari jawabannya.

3.2 Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang (*Statute approach*) dan studi kasus (*case study*). Pendekatan perundang-undangan dipergunakan secara otomatis karena peraturan perundan-

⁷⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 35.

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2006), hal. 10.

gundangan merupakan titik fokus dari suatu penelitian normatif. Untuk studi kasus digunakan karena penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu permasalahan melalui suatu kasus yang terdiri dari unit tunggal, yang dalam hal ini adalah mengenai Putusan Pengadilan Tinggi JAKARTA Nomor 202/PDT/2015/PT.DKI Tahun 2015 yang tidak sesuai dengan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mengikat, membuat taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang tidak mengikat dan menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Disini yang dimaksud dengan bahan sekunder oleh peneliti adalah:

- a. Buku-buku literatur;
- b. Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan arbitrase;

- c. Makalah-makalah atau laporan penelitian; dan
- d. Media massa serta artikel dari internet.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelusuran bahan-bahan hukum diawali dengan kegiatan inventarisasi, dengan pengkoleksian dan perorganisasian bahan-bahan hukum kedalam suatu informasi, sehingga memudahkan kembali penelusuran bahan hukum tersebut. Pengumpulan bahan hukum primer diperoleh dari hasil studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Data sekunder diperoleh dari hasil studi kepustakaan, dokumen dan internet.

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian normatif ini menggunakan teknik analisis bahan hukum interpretasi secara sistematis dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan kemudian dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau keseluruhan sistem hukum, yakni Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dihubungkan dengan persoalan yang ada pada Putusan Pengadilan Tinggi JAKARTA Nomor 202/PDT/2015/PT.DKI Tahun 2015, yang tidak sesuai dengan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Sebab, terciptanya suatu UU dasarnya

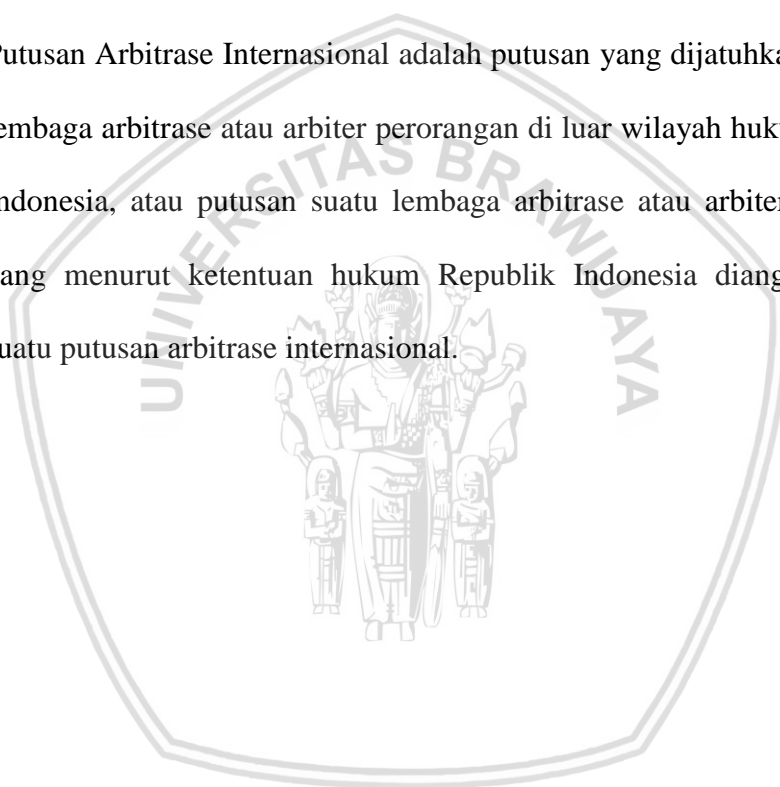
adalah bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang ada dan berlaku sehingga tidak mungkin ada UU tidak terikat dan berdiri sendiri, serta tidak berhubungan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Maka dari itu untuk menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan yang berlaku. Interpretasi ini juga bisa diartikan sebagai interpretasi logis. Dengan mengaitkan peraturan perundang-undangan yang saling berhubungan. Bahan hukum primer digunakan untuk menganalisis keseluruhan permasalahan dalam penelitian ditunjang oleh bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

3.6 Definisi Konseptual

- A. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- B. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yang berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis untuk mencegah timbulnya sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh pihak-pihak setelah timbulnya sengketa.
- C. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- D. Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase
- E. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga

arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

- F. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.
- G. Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum tentang Arbitrase

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa non litigasi atau di luar pengadilan yakni arbitrase, yang pihak-pihak di dalamnya telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase dan menyerahkan sengketa tersebut kepada arbiter yang telah disetujui dan diberikan kewenangan untuk mengadili dan memutus sengketa kedua belah pihak tersebut, putusan yang dihasilkan dari proses arbitrase bersifat akhir atau final dan mengikat kedua pihak (*final and binding*). Tidak seperti proses peradilan yang di dalamnya terdapat upaya hukum banding maupun kasasi. Akan tetapi, dalam arbitrase terdapat beberapa hal yang dapat memungkinkan untuk dilakukan upaya pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri.

Hal yang dapat dilakukan pembatalan putusan arbitrase ini hanya dapat dilakukan jika terdapat hal-hal yang bersifat istimewa atau tidak biasa.⁷⁹ Upaya hukum pembatalan bukanlah merupakan banding biasa terhadap putusan arbitrase, hal tersebut dapat dikatakan istimewa. Prinsipnya suatu pembatalan putusan arbitrase tidak dapat dipenuhi apabila alasan-alasan pembatalan tersebut tidak bersifat khas atau khusus.⁸⁰ Tujuannya adalah agar apabila terdapat upaya

⁷⁹ Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal. 141.

⁸⁰ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 112.

pembatalan putusan arbitrase jangan sampai melenyapkan prinsip *final and binding* dari suatu putusan arbitrase.

Putusan dari arbitrase memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (*final and binding*)⁸¹, yang seharusnya tidak boleh diajukan banding dan kasasi, apalagi peninjauan kembali. Hal tersebut sudah tercantum dan diatur secara tegas dalam berbagai peraturan arbitrase. Seperti dalam pasal 32 Peraturan Prosedur BANI, menyebutkan dengan tegas bahwa putusan arbitrase bersifat *final* dan mewajibkan pihak-pihaknya untuk menepatinya dengan sungguh-sungguh. Kedua belah pihak menjamin akan langsung melaksanakan hasil akhir pemeriksaan sengketa atau putusan dalam arbitrase tersebut. Terdapat batas waktu yang ditetapkan dewan majelis untuk pihak yang kalah agar segera melaksanakan putusan dimana dalam putusan dewan majelis dapat menetapkan sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bunga dalam jumlah yang wajar apabila pihak yang kalah lalai dalam melaksanakan putusan itu. Sesuai dengan yang disebutkan diatas, BANI sudah secara tegas mengatur kekuatan mengikat dari putusan arbitrase serta akibatnya bagi para pihak apabila tidak melaksanakan putusan. Hal inilah yang merupakan salah satu tuntutan pokok putusan arbitrase yang menghendaki proses yang sederhana dan cepat. Apabila telah dikeluarkan putusan, maka dapat langsung dieksekusi dengan cara menutup upaya banding ataupun kasasi.

Maka dari itu putusan arbitrase mempunyai kekuatan yang mewajibkan pihak-pihak yang bersengketa untuk menepatinya dengan sungguh-sungguh dan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). UU No. 30 Tahun 1999 memberikan upaya yang dapat ditempuh apabila pelaksanaan putusan arbitrase

⁸¹ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 60.

secara sukarela tidak dapat dilakukan. Dalam hal ini, atas permohonan dari salah satu pihak yang berselisih, putusan dilaksanakan atas dasar perintah dari Ketua Pengadilan Negeri.⁸² Kemudian, pada saat pemberian perintah pelaksanaan putusan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa pemenuhan Pasal 4 dan 5 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang pastinya tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan norma yang ada. Dalam hal kewenangan memeriksa alasan-alasan atau pertimbangan putusan arbitrase agar putusan tersebut benar-benar mandiri, Ketua Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan tersebut.⁸³ Dalam pasal 68 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga memperjelas sifat *final and binding* yang ada dalam suatu putusan arbitrase internasional.

Kemudian berkaitan dengan syarat-syarat dalam putusan arbitrase, banyak hal yang belum diatur dalam UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Seperti belum adanya aturan tentang akibat hukum yang terjadi apabila syarat-syarat putusan arbitrase (usaha perantara dalam meleraikan sengketa) sebagaimana Pasal 54 sampai dengan Pasal 57 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak terpenuhi. Yang diatur dalam UU tersebut hanyalah kemungkinan untuk mengajukan permohonan kepada majelis arbitrase untuk melakukan koreksi apabila ada kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi tuntutan putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Apa yang dimaksudkan dalam pasal tersebut dengan "koreksi terhadap kekeliruan administratif" ialah pembetulan pada kesalahan-kesalahan layaknya kesalahan pengetikan ataupun kekeliruan

⁸² Indonesia (a), *Op. Cit.*, pasal 61.

⁸³ *Ibid.*, pasal 62 ayat (2) dan Penjelasan.

dalam pengejaan atau penulisan nama, alamat kedua belah pihak atau arbiter, serta hal-hal lain yang tidak merubah substansi putusan. Selanjutnya terhadap kalimat "menambah atau mengurangi tuntutan" maksudnya adalah salah satu pihak bisa menyatakan keberatan pada suatu putusan apabila putusan tersebut, antara lain:

1. Putusan sudah mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut oleh pihak lawan;
2. Dalam putusan tersebut tidak terdapat satu atau lebih hal yang diminta oleh para pihak untuk diputus; atau
3. Terdapat ketentuan mengikat yang bertentangan dalam putusan tersebut.

Alasan-alasan diatas hanyalah beberapa contoh yang ada di dalam pasal 58 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa supaya bisa dilakukan pengurangan atau penambahan pada putusan arbitrase. Penjelasan pasal tersebut di dalamnya terdapat kata "antara lain" yang mengisyaratkan alasan-alasan tersebut tidaklah bersifat membatasi. Selain alasan-alasan yang telah disebutkan diatas, sebenarnya masih banyak alasan-alasan lain untuk dapat dimintakan penambahan atau pengurangan atas suatu putusan arbitrase. Seperti contohnya, jika putusan tersebut tidak jelas, kabur atau tidak tuntas proses pengungkapannya.⁸⁴

Apabila syarat-syarat yang ada dalam putusan arbitrase tidak terpenuhi, baik itu syarat yang sesuai dengan peraturan yang sah maupun syarat material, undang-undang memberikan hak atau kesempatan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengajukan penambahan atau pengurangan atas putusan arbitrase kepada Majelis Arbitrase dalam jangka waktu dua minggu atau empat

⁸⁴ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 108.

belas hari sejak putusan diterima. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

4.2 Pembatalan Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase hanya dapat dilakukan pembatalan apabila terdapat "hal-hal yang bersifat istimewa".⁸⁵ Jika putusan arbitrase dibatalkan, pembatalan putusan tersebut sebenarnya telah memusnahkan nilai yuridis dan secara keseluruhan wujud fisiknya. Sengketa tersebut seolah-olah belum pernah diproses dan diputus. Putusan benar-benar seutuhnya dianggap belum pernah ada.⁸⁶ Mengakibatkan proses pelaksanaan putusan hakim atas putusan arbitrase tersebut tidak akan pernah dilaksanakan.

Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan tentang aturan pembatalan putusan arbitrase yang menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, disembunyikan oleh pihak lawan; dan
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

⁸⁵ Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal. 141.

⁸⁶ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 332.

Kemudian, Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menentukan dalam penjelasannya bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Pembatalan putusan arbitrase di Indonesia sebelum adanya UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah ada dan dilakukan berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 643 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV). Dalam pasal tersebut membatasi alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase, yakni:⁸⁷

1. Apabila putusan melampaui batas-batas persetujuan;
2. Apabila putusan berdasar:
 - a. pembatalan persetujuan, atau
 - b. melewati batas waktunya.
3. Apabila putusan diambil oleh:
 - a. anggota arbiter yang tidak mempunyai kewenangan, atau
 - b. anggota arbiter yang tidak dihadiri oleh anggota arbiter yang lain. Misalnya putusan diambil oleh sebagian kecil arbiter.
4. Apabila putusan:
 - a. telah mengabulkan atau memutus mengenai hal-hal yang tidak dituntut, atau
 - b. telah mengabulkan lebih daripada apa yang dituntut atau “*ultra*

⁸⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 282.

petitum partium” atau “*ultra virus*”.

5. Apabila putusan mengandung:
 - a. pertimbangan yang satu bertentangan dengan pertimbangan yang lainnya, atau
 - b. saling pertentangan antara pertimbangan dengan ucapan atau dictum putusan.
6. Apabila mahkamah tidak mengindahkan atau melalaikan untuk memutus tentang suatu atau beberapa bagian dari persetujuan yang telah diajukan untuk diputus.
7. Apabila mahkamah melanggar aturan beracara menurut hukum yang diancam dengan batalnya putusan. Pelanggaran demikian termasuk tatacara yang disepakati para pihak dalam persetujuan maupun tatacara yang diatur dalam hukum acara.
8. Apabila putusan didasarkan atas:
 - a. kepalsuan surat-surat, dan
 - b. kepalsuan itu diakui atau dinyatakan palsu sesudah putusan dijatuhkan.
9. Apabila setelah putusan dijatuhkan:
 - a. ditemukan surat-surat yang menentukan, dan
 - b. selama proses pemeriksaan, para pihak menyembunyikan surat-surat.
10. Apabila putusan didasarkan atas:
 - a. kekurangan, atau
 - b. buruknya iktikad, dan

- c. hal itu baru diketahui setelah putusan dijatuhkan.

Disini terlihat bahwa RV terdapat alasan-alasan yang lebih beragam perihal pembatalan putusan arbitrase dibandingkan dengan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Akan tetapi dengan berlakunya UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka Pasal 643 RV sudah tidak dapat dijadikan dasar pembatalan putusan arbitrase lagi. Ditegaskan pula pada Ketentuan Penutup dalam UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 RV dinyatakan tidak berlaku.⁸⁸

Pada hakikatnya apa yang ada di dalam penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya memuat tiga dasar atau alasan yang sebelumnya diatur dalam RV, sedangkan hal-hal lain mengenai putusan yang melewati batas-batas persetujuan, kewenangan majelis arbitrase dalam memutus sengketa, dan pelanggaran prosedur tata cara beracara, tidak dimasukkan dalam rumusan Pasal 70. Akan tetapi jika diteliti lagi ke dalam bagian Penjelasan Umum dari UU No. 30 Tahun 1999, maka pembatalan putusan arbitrase dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain:

- a. setelah putusan dijatuhkan, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan dinyatakan atau terbukti palsu
- b. ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan oleh pihak lawan setelah putusan diambil; atau
- c. dalam pemeriksaan sengketa, salah satu pihak menggunakan tipu muslihat dalam mengambil putusan

⁸⁸ Indonesia, *Op. Cit.*, pasal 81.

Terdapat frase “antara lain” di dalam Penjelasan Umum UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatas, yang menimbulkan interpretasi bahwa dasar-dasar pembatalan putusan arbitrase menurut UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak sebatas apa yang ada pada ketentuan dalam Pasal 70 saja, tetapi masih terdapat kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan dasar-dasar di luar ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pemahaman tersebut juga sejalan dengan beberapa pakar hukum. Menurut Hikmahanto Juwana, dasar permohonan pembatalan putusan arbitrase tidaklah terbatas berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal lain yang dapat dijadikan dasar pembatalan adalah keterlambatan dalam memutus perkara. Jika dalam waktu enam bulan sejak majelis arbiter terbentuk perkara belum diputus, maka putusan arbitrase tersebut harus dibatalkan karena cacat hukum. Hal tersebut sesuai dengan isi dari Pasal 48 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, menurut Hikmahanto tidak adanya perjanjian arbitrase sebagai dasar majelis arbiter memeriksa perkara, dapat dijadikan alasan untuk pembatalan.⁸⁹ Kemudian, kewenangan dari prosedur pengambilan putusan arbitrase, antara lain, proses pemilihan arbiter sehingga proses memberlakukan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa, seharusnya dapat juga digunakan sebagai alasan dalam pembatalan putusan arbitrase.⁹⁰

⁸⁹ Mustahil Membatalkan Putusan Arbitrase? <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17607/mustahil-membatalkan-putusan-arbitrase>, www.hukumonline.com, diakses pada 11 Januari 2018.

⁹⁰ Hikmahanto Juwana, *Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional*, jurnal Hukum Bisnis, Vol. 21, Oktober-November 2002, hal. 68.

Walaupun demikian, penafsiran dan pemahaman tentang Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sendiri bermacam-macam berdasarkan para pakar hukum. Munir Fuady mengemukakan dalam buku yang berjudul arbitrase nasional bahwa alasan agar suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri sangat terbatas sebagaimana telah diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁹¹

Perbedaan pemahaman tersebut juga terdapat dalam hal Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menentukan bahwa dasar-dasar permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan. Namun, UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak menjelaskan apakah alasan-alasan pembatalan tersebut harus terlebih dahulu diperiksa dan diputus oleh majelis hakim yang sama yang menangani sengketa arbitrase tersebut atau harus dilakukan oleh majelis hakim yang berbeda. Dalam prakteknya pada saat penggunaan putusan pengadilan sebagai dasar untuk memenuhi alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase juga masih terjadi perdebatan, tercermin dari berbedanya putusan Pengadilan Negeri yang satu dengan yang lainnya dalam mempertimbangkan apakah putusan pengadilan tersebut harus disertakan sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase atau tidak.

Sesuai dengan UNCITRAL Model Law, putusan arbitrase juga dapat dibatalkan oleh Pengadilan apabila ditemukan bahwa sengketa yang diperkarakan tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase menurut hukum di Negara tersebut, dan

⁹¹ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 112.

putusan bertentangan atau melanggar dengan ketertiban umum (*public policy*) di Negara tersebut.⁹²

Selanjutnya tentang pembatalan terhadap putusan arbitrase berdasarkan aturan ICSID dapat dilakukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:⁹³

a. *That the Tribunal was not properly constituted;*

Akibat melanggar ketentuan yang berlaku maka pembentukan Majelis Arbitrase yang memutus sengketa tidak dilakukan menurut tatacara yang tepat. Contohnya, dalam hal penunjukkan arbiter bertentangan dengan tatacara yang diatur dalam Pasal 37 s/d Pasal 40 ICSID karena pembentukan majelis yang memutus sendiri tidak menurut ketentuan, dengan sendirinya putusan yang diambil tidak sah, sehingga salah satu pihak layak mengajukan permintaan untuk membatalkan putusan. Sebaliknya apabila tidak ada permintaan pembatalan meskipun pembentukan Majelis Arbitrase tidak sah, maka putusan tetap dianggap sah. Keabsahan putusan tetap bertahan sampai ada permintaan pembatalan dari pihak yang berkepentingan.⁹⁴

b. *That the Tribunal has manifestly exceeded its powers;*

Majelis Arbitrase dalam mengambil putusan atas sengketa nyata-nyata telah melampaui kewenangannya. Suatu putusan yang dianggap mengandung cacat melampaui batas kewenangan Majelis Arbitrase dapat dibagi sebagai berikut:⁹⁵

⁹² UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985, article 34 (2) b.

⁹³ Convention on The Settlement of Dispute Between States and Nations of Other States (ICSID), article 52 (1).

⁹⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 290.

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 290.

- apabila telah diputus atau dikabulkan sesuatu hal yang sama sekali tidak dituntut dalam claim oleh pihak claimant maupun dalam counter-claim (*rekonvensi*) oleh pihak respondent, atau
- apabila putusan telah mengabulkan melebihi dari apa yang dituntut dalam claim,, untutan balasan atau counter-claim (*ultra petitum partium*).

c. *That there was corruption on the part of the member of the Tribunal;*

Salah seorang anggota arbiter dalam Majelis Arbitrase yang memutus perkara melakukan korupsi. Pengertian korupsi disini bisa berupa tindakan penyalahgunaan, kecurangan atau itikad jahat. Jika ada tindakan seperti itu, putusan arbitrase dianggap mengandung cacat yang dapat dijadikan sebagai dasar alasan untuk meminta pembatalan putusan.⁹⁶

d. *That there has been a serious departure form a fundamental rule of procedure;*

Berangkat dari putusan mengandung penyimpangan yang serius membentuk aturan dasar prosedur yang berlaku secara hukum. Yang dimaksud dengan putusan yang mengandung penyimpangan yang serius dan mendasar adalah, apabila proses pemeriksaan melanggar ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan hukum. Yang dapat dikatakan sebagai penyimpangan tata tertib yang serius dan mendasar adalah pelanggaran aturan tata tertib beracara yang mengandung ancaman batal. Apabila tata tertib yang dilanggar tidak mengandung ancaman batal atau tidak bersifat memerintah atau memberi komando (*imperative*) atau yang dilanggar tidak berbobot memperkosa hak

⁹⁶ *Ibid.*

dan kepentingan salah satu pihak, tidak dapat dikategorikan sebagai penyimpangan yang serius dan fundamental.⁹⁷

e. *That the award has failed to state the reasons on which it is based.*

Majelis Arbitrase telah gagal untuk menyatakan alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan. Putusan tidak memiliki dorongan yang cukup karena hanya berisi kesimpulan yang tidak jelas dasar alasan dari mana kesimpulan itu diambil. Putusan yang demikian dalam praktek di pengadilan kurang memotivasi atau disebut sebagai *onvoldoende gemotiverd*.⁹⁸ Namun demikian, Para Pihak yang bersengketa diperbolehkan untuk mengadakan kesepakatan bahwa putusan tidak perlu menguraikan penjelasan dasar-dasar pertimbangan. Apabila terdapat kesepakatan ini, maka Majelis Arbitrase tidak diwajibkan menjelaskan dasar-dasar alasan putusan. Dalam hal ini, hak para pihak untuk mempergunakan alasan ini sebagai dasar permohonan pembatalan menjadi gugur. Oleh karena itu, alasan ini baru dapat dipergunakan sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian.

Dengan beberapa penjelasan peraturan diatas alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase, pemeriksaan terhadap pembatalan putusan arbitrase tidak boleh menilai dasar hukum dan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan Majelis Arbitrase dalam proses arbitrase. Ini adalah perwujudan dari sifat *final and binding* putusan arbitrase, dimana para arbiter merupakan hakim terakhir baik hukum ataupun fakta dan penghargaan mereka tidak akan terganggu karena alasan kesalahan (*the arbitrators are the final judges of both law and fact and their*

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

*award will not be disturbed for a mistake of either).*⁹⁹ Maka dari itu, Pengadilan tidak mempunyai kewenangan dalam hal memeriksa kembali dasar hukum dan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan Majelis Arbitrase meskipun pada faktanya terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang dilakukan Majelis Arbitrase, ditegaskan dari pernyataan di atas bahwa undang-undang umumnya tidak memberikan hak atas tinjauan pengadilan atas kesalahan hukum untuk menemukan fakta (*it is obvious from the above that the statutes generally provide no right of court review for errors of law or errors as to finding of fact.*)¹⁰⁰

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 yang mengatur bahwa pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan. Namun demikian, praktek pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung masih beranekaragam dan ketidaktaatan atau inkonsistensi, khususnya berkaitan dengan penggunaan dasar atau alasan pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999.

4.3 Analisis Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

Dalam Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, disebutkan bahwa :

1. Pengajuan perihal permintaan pembatalan putusan arbitrase wajib diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
2. Jika permintaan yang terdapat pada ayat 1 dikabulkan, maka Ketua Pengadilan Negeri yang menentukan hal selanjutnya mengenai akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.
3. Untuk putusan tentang permintaan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama dalam rentang waktu satu bulan atau tiga puluh hari dimulai saat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diterima.
4. Untuk putusan Pengadilan Negeri sendiri bisa diminta pertimbangan pemeriksaan ulang perihal banding ke Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan dalam memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.
5. Mahkamah Agung berwenang memberikan pertimbangan dan memberikan putusan permohonan pertimbangan pemeriksaan ulang terhadap banding sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dalam rentang waktu paling lama satu

bulan atau tiga puluh hari dimulai saat permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

Apabila melihat pasal 72 ayat 4 Undang-Undang No.30 tahun 1999 yang menjelaskan bahwa pertimbangan pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan yang lebih tinggi atau banding atas putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan ke Mahkamah Agung. Meskipun telah jelas diatur, terdapat keberagaman dan ketidaktaatan (inkonsistensi) terhadap fungsi kewenangan pengadilan yang dapat membatalkan putusan arbitrase. Sehubungan dengan hal tersebut, disinilah diperlukan adanya ketentuan yang mengatur dengan jelas tentang kewenangan pengadilan mana yang berhak memberikan putusan pembatalan putusan arbitrase, karena adanya kasus tentang pembatalan putusan arbitrase yang dilakukan oleh pengadilan selain Mahkamah Agung, supaya tidak mengganggu asas kepastian hukum dalam arbitrase.

Berikut ini adalah putusan Pengadilan Tinggi Negeri yang tidak sesuai dengan fungsi kewenangannya dalam pembatalan putusan arbitrase yang seharusnya merupakan wewenang Mahkamah Agung.

**Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 202/PDT/2015/PT.DKI tanggal
15 April 2015**

Perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase ini terjadi antara:

1. PT. TUNAS DIPTA PERSADA sebagai pembanding, melawan;
2. KEMENTERIAN KEUANGAN R.I Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN KANTOR LELANG JAKARTA II Cq.

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG
JAKARTA, sebagai terbanding I;

3. PT. HUTAMA KARYA (Persero), sebagai terbanding II; dan:
4. PT. HUTAMA-BINAMAJINT JOINT OPERATION, sebagai turut terbanding I;
5. PT. BINAMAJINT JOINT OPERATION, sebagai turut terbanding II

Duduk Perkara

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 262/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. tanggal 8 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi Kuasa Tergugat II dapat diterima ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.716.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 09/SRT.PDT.BDG/2013/PN.JKT.PST. jo. Nomor 262/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjelaskan bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 Pembanding menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 262/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. tanggal 8 Januari 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para

Terbanding dan para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 19 Desember 2014, tanggal 19 dan 20 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor Perkara 262/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2013 Pembanding menyerahkan catatan yang berisi penjelasan banding (memori banding) dan salinan catatan yang berisi penjelasan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding dan para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 2 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 262/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2015 Terbanding I menyerahkan Kontra Memori Banding dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding dan para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 16 dan 21 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 262/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2015 Terbanding II menyerahkan Kontra Memori Banding dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I dan para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 26 Februari 2015 dan tanggal 2 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding, para Terbanding dan para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 18 dan 19 Desember 2014 serta tanggal 19 dan 20 Januari 2015 telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah diterimanya pemberitahuan tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 262/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Januari 2013 dengan dihadiri oleh Pembanding dan para Terbanding tanpa hadirnya para Turut Terbanding, kemudian pada tanggal 21 Januari 2014 Pembanding mengajukan permohonan banding ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada para Terbanding dan para Turut Terbanding, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan sesuai dengan cara-cara yang ditentukan pasal 7 ayat (1) UURI Nomor 20 tahun 1947, sehingga memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang sah (syarat formal) dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan memperhatikan dengan seksama berita acara sidang dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara Nomor 262/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 262/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. tanggal 8 Januari 2013 dihubungkan dengan Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding para Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerima pembelaan (eksepsi) Terbanding II dan menyatakan menolak gugatan Pembanding pada pokoknya didasarkan pada pertimbangan dalam gugatan *a quo* pihak-pihaknya, objek yang dipertikaian atau disengketakan dan tuntutan dinilai sama dengan perkara Nomor 477/Pdt.G/2002/PN.JKT.BAR dan Nomor 645/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR. yang sudah diputus dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap sehingga gugatan Pembanding terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya atau dinyatakan *nebis in idem* ;

Menimbang, bahwa syarat untuk berlakunya *nebis in idem*, selain pihak-pihak, dasar atau alasan dan tuntutan harus sama dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, juga merupakan syarat yang penting yaitu putusan dimaksud bersifat positif, dalam arti putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut telah memberikan status hukum terhadap hal-hal yang diperselisihkan atau disengketakan ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T.II-3 dan T.II-6 ternyata pihak-pihak, alasan dan tuntutan dalam putusan Nomor 477/Pdt.G/2002/PN.JKT.BAR dan Nomor 645/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR. adalah sama dengan pihak-pihak dan dasar atau alasan dalam gugatan yang mengacu terhadap pembahasan yang sedang dilakukan sebelumnya (*a quo*) dan kedua putusan dimaksud juga telah berkekuatan hukum tetap, namun demikian pokok suatu putusan pengadilan yaitu setelah memutuskan (dictum atau amar) kedua putusan tersebut menyatakan gugatan tidak dapat diterima, maka kedua putusan tersebut

bersifat negatif karena belum memberikan status hukum atas hal-hal yang disengketakan para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Nomor 477/Pdt.G/2002/PN.JKT.BAR dan Nomor 645/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR. bersifat negatif, maka kedua putusan tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan gugatan *nebis in idem*, sehingga eksepsi Terbanding II yang menyatakan gugatan *nebis in idem* tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerima permohonan agar pengadilan menolak perkara yang diajukan oleh penggugat karena tidak memenuhi persyaratan hukum (eksepsi) Terbanding II dan karenanya putusan tersebut harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa gugatan *a quo* secara lengkap dan tuntas, maka dengan mengacu pada azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding II mengenai kewenangan mutlak atau absolut, tidak beralasan oleh karena dasar gugatan Pembanding adalah perbuatan melawan hukum, gugatan demikian menjadi kewenangan badan peradilan umum untuk memeriksa dan mengadilinya. Demikian pula dengan gugatan mengenai pembatalan putusan badan arbitrase menjadi kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan

demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili gugatan peming ;

Menimbang, bahwa mengenai penempatan PT Utama Binamaint Joint Operation sebagai Turut Tergugat dalam gugatan *a quo*, hal demikian merupakan kewenangan Peming (yang berkedudukan sebagai pihak penggugat) untuk menempatkan posisi seseorang dalam gugatannya, sehingga hal tersebut tidak membawa akibat kaburnya gugatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Terbanding II tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa gugatan Peming pada pokoknya didasarkan pada alasan para Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan Terbanding II yang tanpa menyertakan Turut Terbanding II telah menyerahkan pengurusan hutang Peming yang bukan piutang Negara kepada Terbanding I dan perbuatan Terbanding I yang telah menerima penyerahan pengurusan hutang Peming yang bukan piutang negara;

Menimbang, bahwa Terbanding II adalah badan usaha milik Negara dimana modalnya berasal atau bersumber dari keuangan negara, sedangkan Terbanding I adalah instansi yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyelesaikan piutang negara;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Peming yang menyatakan memiliki hutang kepada Terbanding II, maka hutang Peming tersebut merupakan piutang negara, sehingga Terbanding II dapat menyerahkan pengurusan hutang Peming tersebut kepada Terbanding I dan

Terbanding I sesuai kewenangannya berhak menyelesaikan hutang Pembanding kepada Terbanding II atau piutang Terbanding II tersebut ;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II adalah badan hukum swasta, bukan badan hukum milik pemerintah, maka dalam penyerahan pengurusan hutang Pembanding kepada Terbanding I tersebut, Terbanding II tidak perlu mengikut-sertakan Turut Terbanding II ;

Menimbang, bahwa undang-undang memberikan kewenangan kepada PUPN untuk menetapkan suatu hutang sebagai piutang negara, sehingga perbuatan Terbanding I yang menetapkan hutang Pembanding kepada Terbanding II adalah piutang negara, perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan nilai atau jumlah hutang Pembanding kepada Terbanding II, oleh karena nilai hutang tersebut mengacu pada jumlah hutang yang telah diputuskan oleh BANI ditambah dengan komponen bunga, maka nilai atau jumlah hutang tersebut sudah tepat;

Menimbang, bahwa lagi pula nilai hutang sebagaimana dimaksud oleh Pembanding didasarkan pada nilai hutang yang tersebut dalam Surat Perintah Kerja No. 004/TDP/SPK/PMBG/I/1996 tanggal 7 Februari 1996, sedangkan dalam kurun waktu antara tahun 1996 sampai dengan tahun 2011 terutama pada sekitar terjadinya saat reformasi, yang merupakan fakta terkenal (*notoir feiten*) bahwa telah terjadi penurunan yang drastis terhadap nilai rupiah, sehingga tidak tepat dan tidak adil jika Pembanding tetap berpedoman pada nilai hutangnya yang terjadi pada tahun 1996 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terbanding II yang tidak mengikut-sertakan Turut Terbanding II dalam menyerahkan pengurusan hutang Pembanding kepada Terbanding I, demikian pula perbuatan Terbanding I yang telah menerima dan mengurus hutang Pembanding kepada Terbanding II dan telah menetapkan nilai hutang Pembanding kepada Terbanding II, perbuatan-perbuatan tersebut bukan perbuatan yang melawan hukum, karenanya tuntutan Pembanding angka 2 agar Terbanding I dan II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan tuntutan angka 3, 4, 5 dan 6 yang didasarkan pada perbuatan Terbanding I, II yang melawan hukum, tuntutan-tuntutan tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti Pembanding tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Pembanding harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 262/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. tanggal 8 Januari 2013 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 262/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. tanggal 8 Januari 2013

dibatalkan, maka Pembanding berada di pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan ;

Mengingat, HIR, Undang Undang RI Nomor 20 tahun 1947 dan peraturanperaturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 262/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST, tanggal 8 Januari 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI.

- Menolak permohonan pembelaan atau eksepsi Terbanding II ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Pembanding seluruhnya ;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

4.4 Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 202/PDT/2015/PT.DKI tanggal 15 April 2015

Berdasarkan Putusan No. 262/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerima

permohonan pembelaan (eksepsi) kuasa tergugat II karena terbukti gugatan Penggugat adalah *nebis in idem* sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1917 KUH Perdata, bahwa karena permohonan pembelaan (eksepsi) dapat diterima maka alasan eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Pembanding pada pokoknya didasarkan pada pertimbangan dalam gugatan *a quo* pihak-pihaknya, objek yang disengketakan dan tuntutan dianggap sama dengan perkara Nomor 477/Pdt.G/2002/PN.JKT.BAR dan Nomor 645/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR. yang sudah diputus dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap sehingga gugatan Pembanding dinyatakan *nebis in idem*.

Syarat untuk berlakunya *nebis in idem*, selain pihak-pihak, dasar atau alasan dan tuntutan harus sama dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, juga merupakan syarat yang penting yaitu putusan dimaksud bersifat positif, dalam arti putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut telah memberikan status hukum terhadap hal-hal yang disengketakan.

Karena eksepsi Kuasa Tergugat II dapat diterima maka gugatan Penggugat ditolak selanjutnya pihak yang kalah yaitu Penggugat dihukum untuk membayar biaya atau ongkos yang timbul dalam perkara ini. Namun Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusan No. 202/PDT/2015/PT.DKI membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, dengan pertimbangan antara lain bahwa sesuai bukti T.II-3 dan T.II-6 ternyata pihak-pihak, alasan dan tuntutan dalam putusan Nomor 477/Pdt.G/2002/PN.JKT.BAR dan Nomor 645/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR. adalah sama dengan pihak-pihak dan dasar atau alasan dalam gugatan *a quo*

dan kedua putusan dimaksud juga telah berkekuatan hukum tetap, namun demikian amar kedua putusan tersebut menyatakan gugatan tidak dapat diterima, maka kedua putusan tersebut bersifat negatif karena belum memberikan status hukum atas hal-hal yang disengketakan para pihak.

Oleh karena putusan Nomor 477/Pdt.G/2002/PN.JKT.BAR dan Nomor 645/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR. bersifat negatif, maka kedua putusan tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan gugatan *nebis in idem*, sehingga eksepsi Terbanding II yang menyatakan gugatan *nebis in idem* tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak. Dengan demikian putusan tersebut harus dibatalkan karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerima eksepsi Terbanding II.

Berkaitan dengan putusan yang tidak memenuhi syarat dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan *nebis in idem* karena keputusan tersebut bersifat negatif, penulis sependapat dengan keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut. Akan tetapi, menurut penulis putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan arbitrase Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut tidak sesuai dengan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi;

Terhadap putusan Pengadilan Negeri permohonan dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.

Karena dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta seharusnya tidak berhak dan mempunyai kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian untuk banding permohonan pembatalan putusan arbitrase, Mahkamah Agunglah yang memiliki kewenangan pada tingkat pertama dan terakhir.

Putusan dari Pengadilan Tinggi Jakarta dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena alasan tidak adanya kewenangan arbitrase untuk mengadili sengketa tersebut. Alasan tidak adanya kewenangan arbitrase untuk mengadili sengketa sebenarnya tidak terdapat dalam pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999, namun alasan tidak adanya kewenangan arbitrase untuk mengadili sengketa adalah lazim digunakan sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase, sebagaimana dinyatakan oleh Alan Redfern dan Martin Hunter yaitu: ketiadaan penghargaan yang dibuat tanpa yurisdiksi ketika tidak ada perjanjian arbitrase diakui baik dalam hukum nasional dan dalam konvensi internasional yang mengatur arbitrase (*The nullity of an award made without jurisdiction when there was no arbitration agreement is recognised both in national laws and in the international conventions governing arbitration*).¹⁰¹

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan yurisdiksi atau kewenangan arbitrase dapat meliputi, apakah ada perjanjian arbitrase yang sah atau valid, apakah majelis arbiter telah dibentuk secara benar, apakah sengketa

¹⁰¹Alan Redfern & Martin Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, Third Edition (London: Sweet & Maxwell, 1999), hal. 268.

dalam permohonan arbitrase telah sesuai dengan perjanjian arbitrase, dan apakah sengketa tersebut dapat terselesaikan lewat arbitrase (*arbitrable*).¹⁰²

Penggunaan alasan diluar Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 berdasarkan Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 1999 untuk membatalkan putusan arbitrase pun perlu dibatasi, dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak.



¹⁰²*Ibid.*, hal. 421

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas, apabila berpegang pada ketentuan dalam Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 1999, maka akan timbul permasalahan mengenai sejauh mana batasan dari kewenangan pengadilan dalam pembatalan putusan arbitrase. Hal ini penting karena apabila dibuka kemungkinan untuk melakukan upaya pembatalan, maka pengaturan dan batasan atas kewenangan dan upaya tersebut seharusnya diatur dengan jelas dan pasti. Seperti halnya pada putusan pengadilan tinggi Jakarta Nomor 202/PDT/2015/PT.DKI Tahun 2015 diatas, dimana isinya adalah pembatalan putusan arbitrase nomor 262/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa UU No. 30 Tahun 1999 sendiri mengandung saling pertentangan antara bagian Batang Tubuh undang-undang dengan bagian Penjelasan Umum, khususnya mengenai pembatalan putusan arbitrase. Kondisi ini secara nyata dapat membawa ketidakpastian hukum khususnya bagi para pihak yang telah mengadakan proses arbitrase, serta memunculkan adanya celah hukum yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik.

Merujuk pada fakta-fakta yang diuraikan di atas, menurut hemat Penulis, perlu dibuat suatu peraturan yang berisi pedoman mengenai kewenangan pengadilan yang berhak membatalkan putusan arbitrase secara

jelas dan pasti, untuk lebih menjelaskan pasal 72 ayat 4 Undang-Undang No.30 tahun 1999. Karena berdasarkan kasus diatas telah terjadi kesalahan wewenang yang dilakukan pengadilan yang tidak semestinya berwenang membatalkan putusan arbitrase.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan penggunaan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase dan kewenangan pengadilan mana yang berhak membatalkan putusan arbitrase sesuai dengan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, maka perlu dibuat suatu peraturan yang lebih jelas mengenai batasan sejauh mana wewenang pengadilan di luar Mahkamah Agung dalam suatu sengketa arbitrase, agar tidak terjadi pembatalan putusan arbitrase yang tidak sesuai dengan kewenangan pengadilan yang semestinya berwenang.
2. Diperlukan adanya kesatuan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam hal memeriksa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi Negeri yang menolak atau pun memutus pembatalan putusan arbitrase. Sehingga terjadinya kesalahan wewenang terhadap pembatalan putusan arbitrase dapat di pantau dan dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Adolf, Huala. “Syarat Tertulis dan Independensi Klausul Arbitrase”. Buletin Triwulan Arbitrase Indonesia No. 6, 2009.

Basarah, Moch. *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*. Bandung: Genta Publishing, 2011.

Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan International*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Gautama, Sudargo. *Aneka Hukum Arbitrase (Ke Arah Hukum Arbitrase Indonesia yang Baru)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Gautama, Sudargo. *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Harahap, M. Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Harahap, M. Yahya. *Arbitrase*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Hardijan Rusli, “*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*”, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006.

Irianto, Catur. *Pelaksanaan Klausula-Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Bisnis*. Bandung: Inti Media Pustaka, 2007.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008.

Latip, Yansen Dermanto. *Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Kontrak Internasional*. Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2002.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Munir Fuady, *Arbitrase Nasional-Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Nygh, Peter. *Autonomy in International Contracts*. Oxford: Clarendo Press, 1999.

Rajagukguk, Erman. *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*.
Jakarta: Chandra Pratama, 2000.

Redfern, Alan dan Martin Hunter, *Law and Practice of
International Commercial Arbitration*, Third Edition. London:
Sweet & Maxwell, 1999.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-
Press, 2006.

Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta:
PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Sudiarto, H. dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase Salah Satu
Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cet. Ke-1. Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Sutiyoso, Bambang. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta:
Citra Media, 2006.

Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) &
Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor:
PT.Ghalia Indonesia, 2004.

Usman, Rachmadi. *Hukum Arbitrase Nasional*. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2002.

Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Arbitrase*. Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Winardi, *Asas-Asas Administrasi Bisnis (Business Administration)*, Bandung: Mandar Maju, 2001.

II. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. UU No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 48 Tahun 1999, LN. No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5067.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Penyelesaian Sengketa Antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal*. UU No. 5 Tahun 1968.

LN. No. 32 Tahun 1968, TLN No. 2852.

Mahkamah Agung RI. *Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing*. Perma No. 1 Tahun 1990 tanggal 1 Maret 1990.

Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, United Nations, 1958.

III. Internet

ICSID Basic Submission Clauses,

<<http://icsid.worldbank.org/ICSID/StaticFiles/model-clauses-en/7.htm#a>>, diakses pada 6 Januari 2018.

UNCITRAL Model Arbitration Clause,

<<http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules/arb-rules.pdf>>, diakses pada 6 Januari 2018.

Mustahil Membatalkan Putusan Arbitrase?

<<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17607/mustahil-membatalkanputusan-arbitrase>>, diakses pada 11 Januari 2018

Juwana, Hikmahanto. "*Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional*". Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 21, Oktober-November 2002.

